

AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KOMUNIKASI POLITIK

(Studi Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Ilmu Ushuluddin**

Disusun Oleh :

FEBRIANTONI

NPM : 1231040018

Program Studi : Pemikiran Politik Islam



FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

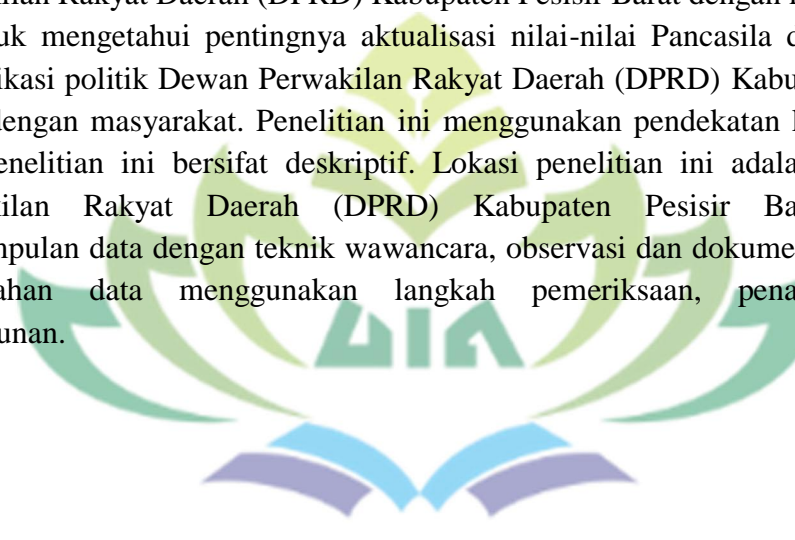
RADEN INTAN LAMPUNG

1441H/2020M

ABSTRAK

Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat adalah perwakilan dari masyarakat di dapilnya masing-masing untuk mengamalkan Pancasila. Maka dari itu, anggota dewan harus menjadi garda terdepan untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam proses komunikasi politik.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah aktualisasi Pancasila dalam komunikasi politik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat dengan masyarakat? 2) Seberapa penting aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam komunikasi politik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat dengan masyarakat? Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui wujud aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam bentuk komunikasi politik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat dengan masyarakat. 2) Untuk mengetahui pentingnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam bentuk komunikasi politik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat dengan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Lokasi penelitian ini adalah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat. Teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data menggunakan langkah pemeriksaan, penandaan, dan penyusunan.



PERNYATAAN ORISINALITAS

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Febriantoni

NPM : 1231040018

Program Studi : Pemikiran Politik Islam

Menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul **AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KOMUNIKASI POLITIK (Studi Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat)**. Dengan ini saya meyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri dan tidak ada unsur plagiat, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya adalah hasil karya orang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Bandar Lampung, 7 September 2020

Yang menyatakan



Febriantoni
1231040018



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721)703531780421

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Komunikasi Politik (Studi
Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat)
Nama Mahasiswa : Febriantoni
NPM : 1231040018
Prodi : Pemikiran Politik Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Ushuluddin dan
Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I


Dr. M. Agil Irham, M. Si

NIP. 196912111994031005

Pembimbing II


Tin Amalia Fitri, M. Si

NIP. 1957111519992031001

Ketua Prodi Pemikiran Politik Islam


Tin Amalia Fitri, M. Si

NIP. 1957111519992031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721)703531780421

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KOMUNIKASI POLITIK (Studi Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat)** disusun oleh: **Febriantoni, NPM 1231040018, Program Studi Pemikiran Politik Islam**, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama pada hari/tanggal: **Senin/02 November 2020**.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang : Dr. Idrus Ruslan, M.Ag 

Sekretaris : Eska Prawisudawati Ulpa, M. Si 

Penguji I : Dr. M. Sidi Ritaudin, M. Ag 

Penguji II : Dr. M. Aqil Irham, M. Si 

Penguji III : Dr. Tin Amalia Fitri, M. Si 

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama



Dr. H. M. Khif Anshori M.Ag
NIP. 196003131989031004

MOTTO

“Saya ingin di masa yang akan datang ada negeri yang ber-Pancasila, dan saya akan riang gembira menjadi rakyatnya. Saya ingin menjadi warga suatu negara dimana Pancasila menjadi keutamaan pandangan hidupnya, prinsip mendasar perjuangannya dan panduan primer perjuangan sejarahnya. Kalau tidak mungkin, ya provinsi Pancasila, atau kabupaten, kecamatan, desa Pancasila. Kalau tetap mustahil yang keluargaku harus keluarga Pancasila.”

(Emha Ainun Najib)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah-Nya. Skripsi ini peneliti persembahkan kepada :

1. Kedua orangtua penulis, bapak Arsan Said dan Ibunda Yuliawati yang sangat penulis cintai dan muliakan. Doa tulus selalu kupersembahkan atas jasa, pengorbanan, dan keikhlasan memberikan pendidikan dengan tulus dan penuh dengan kasih sayang sehingga menghantarkanku menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung. Terimakasih atas jerih payah, tetesan keringat, perjuangan serta keikhlasan yang begitu tulus dari bapak ibu selama ini.
2. Adik penulis, Defrizal dan Edi Munawar yang sangat penulis sayangi dan banggakan.
3. Keluarga besar Syafi'I dan keluarga besar yang sangat penulis sayangi dan cintai.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Pekon Sumber Agung, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal 28 Juli 1993. Anak pertama dari tiga bersaudara atas pasangan Bapak Arsan Said dan Ibu Yuliawati.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 1 Sumber Agung, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat tahun 2006. Selanjutnya penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah pertama di SMPN 1 Ngambur, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat dan selesai pada tahun 2009. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas di SMAN 1 Ngambur, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat dan selesai pada tahun 2012. Pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi UIN Raden Intan Lampung dan diterima sebagai mahasiswa jurusan Pemikiran Politik Islam di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.

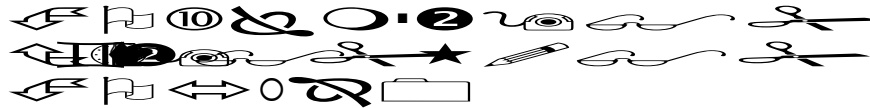
Selama menjadi mahasiswa di kampus UIN Raden Intan Lampung penulis aktif mengikuti organisasi, yaitu ORMAWA Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, puncaknya adalah ketika penulis diamanahkan menjadi ketua DEMA Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, dan ditahun yang sama juga penulis menjabat sebagai wakil ketua FORMADINA (Forum Mahasiswa Ushuluddin se-Indonesia).

Selanjutnya penulis juga aktif di organisasi ekstra kampus, yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Di organisasi PMII penulis diberi

amanah sebagai wakil ketua pada tahun 2014-2015 dan PERDAPENA (Persatuan Pemuda Pelajar Ngambur) penulis diamanahkan menjadi sekretaris. Selain itu, selama menempuh pendidikan di UIN Raden Intan Lampung penulis juga sembari menuntut ilmu di Pondok Pesantren Al-Munawarrusholeh Teluk Betung.



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Agama dan Perubahan Sosial dalam Pandangan Ali Syariati” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang mengikuti ajarannya. Aminya Rabbal’alamin.

Skripsi ini ditulis serta diselesaikan sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Peneliti sangat menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak serta berkat rahmat Allah SWT, kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan baik. Untuk itu peneliti menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. M. Afif Anshori, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
3. Tin Amalia Fitri, M. Si selaku Ketua Prodi Pemikiran Politik Islam

4. Dr. H. Muhammad Aqil Irham, M. Si selaku pembimbing I yang telah memberikan saran dan bimbingannya dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Tin Amalia Fitri, M. Si selaku pembimbing II yang telah memberikan saran dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Wakil Dekan dan Dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah membekali ilmu, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini.
7. Bapak Piddinuri, Aguscik, M. Towil dan Gusti Kadi Artawan anggota DPRD Pesisir Barat yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini.
8. Abah Dr. KH. Ainal Ghani, S. Ag, S.H, M. Ag dan Bu Nyai Siti Zulaikha M. Ag selaku pimpinan Ponpes Al- Munawarrusholeh serta kawan-kawan santri.
9. Sahabat-sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), pengurus DEMA, dan kawan-kawan seperjuangan dalam berbagai organisasi serta rekan-rekan mahasiswa yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu namanya yang telah memotivasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Hanya Allah SWT yang dapat membalas jasa dan kebaikan mereka akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memotivasi, membimbing, dan membantu hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga mendapat ganjaran yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Bandar Lampung, 7 September 2020

Penulis,

Febriantoni

NPM. 1231040018



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	5
C. Latar Belakang Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah	19
E. Tujuan Penelitian	20
F. Kegunaan Penelitian.....	20
G. Metode Penelitian.....	21
H. Tinjauan Pustaka	29

BAB II PANCASILA DAN BENTUK KOMUNIKASI POLITIK

A. Pancasila	
1. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Dan Negara.....	32
2. Eksistensi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara .	37
3. Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	65
B. Komunikasi Politik	

1. Pengertian Komunikasi Politik	68
2. Unsur-Unsur Komunikasi Politik.....	69
3. Fungsi Komunikasi Politik.....	80
4. Tujuan Komunikasi Politik	81

BAB III PROFIL DAN KOMUNIKASI POLITIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD KABUPATEN PESISIR BARAT

A. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat	
1. Karakteristik Masyarakat Di Kabupaten Pesisir Barat.....	85
2. Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat.....	97
3. Kurikulum Vitae Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat.....	98
B. Pentingnya Aktualisasi Nilai Pancasila Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Untuk Menyelesaikan Permasalahan di Kabupaten Pesisir Barat	
1. Bidang Struktur Dan Infrastruktur	103
2. Bidang Pendidikan	103
3. Bidang Kesehatan.....	103
4. Bidang Kepemudaan	104
5. Bidang Pekerjaan	104

BAB IV BENTUK AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KOMUNIKASI POLITIK KOMUNIKASI POLITIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD KABUPATEN PESISIR BARAT TERHADAP MASYARAKAT

A. Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Komunikasi Personal DPRD Kabupaten Pesisir Barat	106
B. Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Komunikasi Organisasi DPRD Kabupaten Pesisir Barat	109
C. Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Komunikasi Masa DPRD Kabupaten Pesisir Pesisir Barat.....	111

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	114
B. Saran.....	115
C. Penutup.....	117

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan hal yang sangat penting dari karya ilmiah, karena judul ini akan memberikan gambaran tentang keseluruhan isi skripsi. Adapun judul karya ilmiah yang peneliti bahas dalam skripsi ini adalah : Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Komunikasi Politik (**Studi Kasus Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat**).

Menghindari salah pengertian dalam memahami maksud judul proposal ini, terlebih dahulu akan peneliti uraikan beberapa istilah pokok yang terkandung dalam judul tersebut. Hal ini selain dimaksudkan untuk lebih mempermudah pemahaman, juga untuk mengarahkan pada pengertian yang jelas sesuai dengan yang dikehendaki peneliti. Berikut ini dapat dijelaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul.

Aktualisasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia Aktualisasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan suatu konsep yang sudah ada sebelumnya.¹ Aktualisasi merupakan suatu bentuk kegiatan melakukan realisasi antara pemahaman akan nilai dan norma dengan tindakan dan perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan aktualisasi pancasila, berarti penjabaran nilai-nilai pancasila dalam bentuk norma-norma, serta merealisasikannya dalam kehidupan

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Revisi ke-2 cet. IV (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 988.

berbangsa dan bernegara. Dalam aktualisasi Pancasila ini, penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma, dijumpai dalam bentuk norma hukum, kenegaraan, dan norma-norma moral. Sedangkan realisasinya dikaitkan dengan tingkah laku semua warga negara dalam masyarakat, berBangsa dan berNegara, serta seluruh aspek penyelenggaraan negara.

Nilai yang dalam bahasa Inggris “*value*” termasuk pengertian filsafat. Sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila sesuatu itu berguna benar (nilai kebenaran), indah (nilai aesthetis), baik (nilai moral/etis), religious (nilai agama).²

Nilai yaitu sesuatu yang berharga, indah, bermanfaat, memperkaya batin, serta menyadarkan manusia terhadap harkat dan martabatnya. Terbentuknya nilai atas dasar suatu pertimbangan cipta, rasa, dan keyakinan seseorang, kelompok maupun bangsa. Nilai berumber dari kebudayaan yang memiliki fungsi dan mendorong dan mengarahkan sikap serta perbuatan manusia.

Prof. Dr. Drs. Mr. Notonegoro membagi nilai menjadi tiga:

1. Nilai materiil, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia .
2. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktifitas .
3. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.

Pancasila terdiri dari dua kata, panca artinya ‘lima’ dan sila artinya ‘dasar’, secara harfiah pancasila memiliki pengertian “dasar yang memiliki lima

² Wahyu Widodo dan Budi Anwar, *Pendidikan Pancasila Hakikat, Penghayatan, dan Nilai-Nilai Pancasila*, (Yogyakarta: Andi), h. 115.

unsur”, banyak ahli menyimpulkan bahwa Pancasila adalah cerminan dari perjalanan budaya dan karakter bangsa Indonesia yang telah berlangsung selama berabad-abad lampau.³ Pancasila secara terminologi adalah suatu azas pandangan dunia, suatu azas pandangan hidup, buah hasil perenungan jiwa yang mendalam, buah hasil penelaahan cipta yang teratur dan seksama diatas basis pengetahuan dan pengalaman hidup yang luas (Notonagoro, 1975).⁴ Dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1978, Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, keberibadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia dan dasar Negara kita.⁵

Komunikasi Politik dapat diartikan sebagai suatu proses komunikasi yang memiliki implikasi atau konsekuensi terhadap aktivitas politik. Faktor ini pula yang membedakan disiplin komunikasi lain seperti komunikasi pembangunan, komunikasi organisasi, dll.⁶

Menurut Chaffe (1975), komunikasi politik itu dipahami sebagai peran komunikasi dalam proses politik.⁷

Menggunakan perspektif interpretif dan transaksional, definisi komunikasi politik sebagai “pertukaran makna di antara dua pihak lebih yang berkaitan dengan distribusi dan pengelolaan kekuasaan. Pesan politik yang dipertukarkan ini

³ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi, Ham dan Masyarakat Madani*, edisi revisi, (Jakarta: Pranada Media Group dan ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Cet, VIII, 2011), h. 35

⁴ Slamet Sutrisno, *Filsafat dan Ideologi Pancasila* (Yogyakarta, Andi, 2006), h. 73.

⁵ Padmo Wahjono, *Bahan-bahan Pedoman Penghayatan dan Pengamatan Pancasila*, (Jakarta: Aksara Baru, 1984), h. 73.

⁶ Hafied Cangara, *komunikasi politik: Konsep, Teori, dan Strategi*, edisi revisi 2011, (Jakarta: Rjawali Pers, 2011), h. 4.

⁷ Gun gun Heryanto dan Shulhan Rumar, *Komunikasi Politik Suatu Pengantar*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), h. 4.

bisa disengaja ataupun tidak, baik verbal ataupun nonverbal.⁸ Selain itu komunikasi juga dapat diartikan suatu penyampaian pesan politik yang secara sengaja dilakukan oleh komunikator kepada komunikan dengan tujuan membuat komunikan berperilaku tertentu.⁹

Menurut Miriam Budiardjo, komunikasi politik merupakan salah satu fungsi partai politik, yakni menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat serta mengaturnya sedemikian rupa “penggabungan kepentingan” (interest aggregation) dan “perumusan kepentingan” (interest articulation) untuk diperjuangkan menjadi kebijakan publik.¹⁰

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3: "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum".¹¹ DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Perwakilan dari masing-masing fraksi Dewan Perwakilan

⁸ Deddy Mulyana, *Komunikasi Politik Ilmu Komunikasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h. 10.

⁹ Fitri Yanti, *Komunikasi Politik dan Politik Komunikasi Suatu Relasi dan Peran Media Masa*, *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 5 No. 3 (Januari-Juni 2007), H. 52.

¹⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 405-406.

¹¹ UUD RI 1945 Pasal 18 ayat 3.

Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat yaitu perwakilan dari fraksi ' PDIP, fraksi Grindra-PKS, fraksi Demokrat dan fraksi Pesisir Barat Bersatu.

Dari penegasan judul di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu penelitian yang membahas penjabaran nilai-nilai pancasila dalam bentuk norma-norma, serta merealisasikannya dalam komunikasi oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat kepada masyarakat di daerah tersebut.

B. Alasan memilih Judul

Terbentuknya judul dalam penelitian ini, dikarenakan adanya sebuah masalah atau problem sehingga tergerak untuk dilakukan penelitian. Adapun hal-hal menarik atau alasan-alasan peneliti dalam memilih judul proposal ini ialah sebagai berikut :

1. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung konsekuensi setiap aspek dalam penyelenggaraan negara dan sikap dan tingkah laku bangsa Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara harus berdasar pada nilai nilai Pancasila. Hakikat Pancasila adalah bersifat universal, tetap dan tidak berubah. Nilai nilai tersebut perlu dijabarkan dalam setiap aspek dalam penyelenggaraan negara dan dalam wujud norma norma baik norma hukum, kenegaraan, maupun norma norma moral yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia termasuk juga dalam komunikasi politik.

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan haruslah menjunjung aspirasi rakyat dan harus atas nama rakyat, apa yang menjadi hasil kebijakannya. Oleh karena itu komunikasi antara Dewan Perwakilan rakyat (DPR) dan masyarakat di daerah pemilihannya sangatlah penting. Maka dari itu Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia harus hadir dalam proses Komunikasi politik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan konstituennya agar setiap warga negara Indonesia dapat mengamalkannya. Pada akhirnya, setiap warga negara tidak akan mudah goyah dengan masuknya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membawa masuk ideologi-ideologi yang lain yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila harus diterapkan pada semua nilai, karena merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan dan menjiwai satu dengan yang lain.
3. Judul ini sangat relevan dalam rangka untuk mengembangkan keilmuan pada Fakultas Ushuluddin khususnya Jurusan Pemikiran Politik Islam.

C. Latar Belakang Masalah

Komunikasi politik, baik sebagai kajian teoritis maupun praktis senantiasa bersifat dinamis. Banyak konsep dan istilah baru yang muncul seiring dengan muncul dan berkembangnya praktis komunikasi politik diberbagai Negara. Komunikasi politik seolah-olah tak terpisahkan dari dinamika politik yang terjadi sejak dahulu hingga sekarang. Aktivitas seperti kampanye, propaganda, retorika politik, lobi dan negosiasi, pembentukan opini publik, publisitas politik serta

sejumlah aktivitas komunikasi lainnya menjadi begitu penting dalam upaya memengaruhi lingkungan politik.¹²

Politik paling aneh, paling absurd, paling unik, dan sekaligus paling sulit diramalkan adalah politik di Indonesia. Hingga kini, politik lokal, dan politik nasional pun bercampur dengan klenik.¹³

Komunikasi politik lebih lazim didefinisikan sebagai suatu proses linier atau suatu sistem. Pendekatan linier berorientasi pada efek atau pengaruh pesan politik, sedangkan pendekatan sistem berorientasi pada kestabilan atau kesinambungan suatu sistem politik. Kedua pendekatan ini memandang realitas komunikasi politik sebagai realitas yang teratur dan karenanya mudah diramalkan, seperti realitas alam yang ditandai dengan hubungan sebab akibat.

Definisi komunikasi politik di Indonesia lebih cocok kalau dikonseptualisasikan sebagai komunikasi politik yang dinamis, mudah berubah, rumit dan bahkan sulit diramalkan. Apalagi komunikasi politik di Indonesia bemuansa konteks-tinggi: lebih banyak pesan-pesannya yang tersirat daripada tersurat, termasuk pesan melalui bahasa tubuh, busana, dan diam.¹⁴

Secara historis, munculnya Pancasila tidak bisa dilepaskan dari situasi perjuangan bangsa Indonesia menjelang kemerdekaan. Keinginan lepas dari belenggu penjajahan asing dan belenggu pemikiran ideologis dunia saat itu, yakni ideologi leberalisme dan komunisme, para tokoh bangsa antara lain Soekarno

¹² Gun Gun Heryanto dan Shulhan Rumar, *Op.Cit*, h. 1.

¹³ Deddy Mulyana, *Op.Cit*, h. 1.

¹⁴ *Ibid*, h. 10.

dengan sungguh-sungguh menggali nilai-nilai dari negerinya sendiri yang akan dijadikan panduan dan dasar bagi Indonesia merdeka. Panduan dan dasar negara Indonesia, menurut Soekarno, mestilah bukan meminjam dari unsur-unsur asing yang tidak sepenuhnya sesuai dengan jati diri bangsa, tetapi harus digali dari rahim kebudayaan bangsa sendiri.

Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Dalam pidato di Persidangan Bangsa-Bangsa, pada 30 september 1960, yang memperkenalkan pancasila kepada dunia, presiden Soekarno mengingatkan pentingnya konsepsi dan cita-cita bagi suatu bangsa: "Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Jika mereka tak memiliki atau konsepsi dan cita-cita itu kabur dan usang, maka bangsa itu adalah dalam bahaya" (Soekarno).¹⁵

Tiap nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di tanah kelahirannya, akan sulit sulit bagi bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita kemerdekaannya, suasana kebatinan ingin lepas dari dua kungkungan inilah Pancasila seyogianya diposisikan, sehingga keinginan-keinginan sebagai pihak yang hendak membawa Indonesia kearah tatanan demokrasi leberal mapun sosialisme dapat diinginkan

¹⁵ Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Emoat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, cet ke 2, 2012), h. 2.

kembali pada konteks sejarah lahirnya Pancasila yang berusaha menggabungkan segala kebaikan-kebaikan yang terdapat pada dua ideologi dunia tersebut.¹⁶

Pancasila dirasa sangat sesuai dan tepat untuk mengakomodir seluruh ras, suku bangsa, dan agama yang ada di Indonesia. Hal ini dibuktikan bahwa sila-sila Pancasila selaras dengan apa yang telah tergaris dalam al-Qur'an.

Ketuhanan Yang Maha Esa. al-Qur'an dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mengesakan Tuhan (misalkan QS. al-Baqarah: 163). Dalam kacamata Islam, Tuhan adalah Allah semata. Namun, dalam pandangan agama lain Tuhan adalah yang mengatur kehidupan manusia, yang disembah.

Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mencerminkan nilai kemanusiaan dan bersikap adil (Qs. al-Maa'idah: 8). Islam selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bersikap adil dalam segala hal, adil terhadap diri sendiri, orang lain dan alam.

Persatuan Indonesia. Semua agama termasuk Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bersatu dan menjaga kesatuan dan persatuan (Qs. Ali Imron: 103).

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan/ perwakilan. Pancasila dalam sila keempat ini selaras dengan apa yang telah digariskan al-Qur'an dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara. Islam selalu mengajarkan untuk selalu bersikap bijaksana dalam

¹⁶ Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Op.Cit*, h. 36.

mengatasi permasalahan kehidupan (Shaad: 20) dan selalu menekankan untuk menyelesaikannya dalam suasana demokratis (Ali Imron: 159).

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila yang menggambarkan terwujudnya rakyat adil, makmur, aman dan damai. Hal ini disebutkan dalam surat al-Nahl ayat 90.

Hal yang patut dicatat sepanjang perumusan dasar negara Pancasila adalah nilai-nilai religius yang selalu ada pada setiap usulan tentang falsafah negara Indonesia merdeka. Nilai-nilai transenden inilah yang kemudian menjadi spirit menyinari semua sila-sila yang terdapat pada Pancasila. Kelima sila Pancasila saling berkaitan satu dengan yang lainnya dengan nilai-nilai ketuhanan sebagai sokoguru bagi nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan yang dicita-citakan para pediri bangsa.

Sehingga demokrasi Indonesia yang hendak diwujudkan adalah tidak sebatas demokrasi prosedural yang bertopang pada dukungan modal segelintir orang, tetapi demokrasi yang dapat melahirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mampu memuliakan kemanusiaannya dan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan sebagai sebuah negara yang merdeka yang bebas menjalankan kepercayaan dan keyakinan masing-masing.¹⁷

Demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi permusyawaratan versi Indonesia yang menekankan pada kesepakatan-kesepakatan serta menyelaraskan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, yang secara teoretis seruang

¹⁷ A. Ubaidullah Rozak, *Op.Cit*, h. 42.

dengan konsep yang lahir kemudian yang dikenal dengan istilah “demokrasi liberative” (*delebertive democracy*) yang disuarakan oleh Joseph M. Bessette pada 1980 dan sejajar dengan konsep “sosial demokrasi” (*sosdem*).¹⁸

Di masyarakat modern yang luas dan kompleks, banyak ragam pendapat dan aspirasi yang berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara di padang pasir, apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan (*interest aggregation*). Sudah digabungkan, pendapat dan aspirasi tadi diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur. Proses ini dinamakan perumusan kepentingan (*interest articulation*).¹⁹

Seandainya tidak ada yang mengagregasi dan mengartikulasi, niscaya pendapat atau aspirasi tersebut akan simpang siur dan saling berbenturan, sedangkan dengan agregasi dan artikulasi kepentingan kesimpangsiuran dan benturan dikurangi. Agregasi dan artikulasi itulah salah satu fungsi komunikasi partai politik.²⁰ Komunikasi politik juga dapat diartikan “suatu penyampaian pesan politik yang secara sengaja dilakukan oleh komunikator kepada komunikan dengan tujuan membuat komunikasi berperilaku tertentu”. Sebelum suatu pesan politik dapat dikonstruksikan untuk disampaikan kepada komunikan dengan tujuan mempengaruhinya, dan harus terdapat pertimbangan. Kenyataan dalam kehidupan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Mirriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 405.

²⁰ *Ibid.*, h. 406.

politik menunjukkan bahwa seorang pemimpin politik adalah orang yang memiliki kemampuan memobilisasi opini publik dan kegiatan memobilisasi opini publik adalah komunikasi.

Komunikasi yang baik sangat penting bagi efektivitas kelompok atau organisasi apapun, karena riset yang ada mengindikasikan bahwa komunikasi yang buruk paling sering disebut-sebut sebagai sumber konflik antar personal. Komunikasi dipandang sangat penting karena dengan komunikasi memungkinkan terbentuknya organisasi, dan selanjutnya organisasi telah memungkinkan kita untuk memperoleh atau mendapatkan sistem corak kehidupan yang teratur seperti sekarang ini.

Dengan kata lain, tanpa adanya sebuah komunikasi yang baik niscaya sebuah organisasi politik apapun tidak akan mencapai tujuannya. Komunikasi politik disini adalah mutlak meliputi seluruh anggota partai dan masyarakat setempat yang dapat berupa penyampaian-penyampaian informasi, dan himbauan yang bersifat untuk meningkatkan citra partai politik. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi yang berguna untuk mengkoordinasikan lingkungan atau masyarakat dan orang lain demi mencapai tujuan partai politik. Partai politik selain menjelaskan atau mengkritisi program-program pemerintah (partai yang sedang berkuasa), melalui berbagai pertemuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, partai politik juga menyerap pandangan, ide, dan pemikiran masyarakat mengenai berbagai isu kenegaraan yang sedang berkembang. Pada partai politik yang dikembangkan secara sehat, terutama dalam masyarakat yang pilihan-pilihannya dilakukan diluar

kerangka primordialisme dan patrimonialisme, ide-ide yang berkembang dalam masyarakat yang berhasil mereka serap, akan menjadi bahan pertimbangan yang penting didalam membuat keputusan-keputusan politik partai yang bersangkutan. Dengan berbagai kegiatan inilah sesungguhnya setiap anggota DPRD, sadar atau tidak sadar, telah melaksanakan fungsinya sebagai penghubung antara rakyat dengan pemerintah, baik dalam pengertian positif maupun negatif. Sebagaimana yang telah dikemukakan diawal tadi, bagaimana aspirasi masyarakat ini bisa tersalurkan kepada pemerintah, maka disinilah fungsi dari partai politik yang akan menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa. Oleh Pemerintah Daerah juga harus dapat menampung semua aspirasi masyarakat (asmar) untuk dapat diakomidir yang berasal dari Usul ataupun kebijaksanaan partai dalam anggaran dan diproses sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari musrenbang desa, kecamatan, kab/kota sampai ditingkat pusat dan pada akhirnya merupakan Kebijakan Umum (Public Policy) atau dalam bentuk RPJP/RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Pendek dan Menengah) yang kesemua ini adalah dalam kerangka pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Sebaliknya, partai politik juga dapat menyampaikan dan menginformasikan kepada masyarakat, kegiatan atau program-program pemerintah dalam bentuk Kebijakan Umum, dengan demikian kalau hal ini terjadi, maka akan terciptakan komunikasi politik dari bawah ke atas dan sebaliknya dari atas kebawah, dimana partai politik dapat memainkan peranannya sebagai penghubung antara yang memerintah dengan diperintah, antara pemerintah dan warga masyarakat. Melihat hal diatas, partai

politik dalam menjalankan fungsinya sering disebut sebagai broker (perantara) dalam suatu bursa ide-ide (clearing house of ideas) dan bisa juga dikatakan bahwa partai politik bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar dan bagi warga masyarakat sebagai pengeras suara.

Bahwa Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga cita-cita para pendiri bangsa Indonesia dapat terwujud. Pandangan hidup yang dijadikan ideologi bangsa mengandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh sebuah bangsa dan pikiran-pikiran terdalam serta gagasan-gagasan sebuah bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pandangan hidup sebuah bangsa adalah perwujudan nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa itu yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad bagi bangsa itu. Dan Pancasila dalam perspektif Islam bahwa sila-sila Pancasila selaras dengan apa yang telah tergaris dalam al-Qur'an, upaya yang dilakukan itu dengan menyelami nilai-nilai luhur Pancasila, banyak langkah-langkah yang harus kita ambil untuk menjalankan atau menerapkan Pancasila dalam kehidupan kita.

Politik merupakan suatu peristiwa, kegiatan, atau proses yang melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam suatu negara dalam membuat kebijakan, keputusan, atau mendistribusikan nilai (barang dan jasa) untuk

mewujudkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat, bangsa, dan Negara.²¹

Untuk menumbuhkan kepercayaan dan dukungan publik terhadap kepentingan politik yang diharapkan, seorang politikus dituntut untuk aktif berinteraksi dalam suasana sosial dimana ia berada. Kunci dari kepercayaan adalah bagaimana proses komunikasi, baik verbal maupun nonverbal, dibangun sebaik mungkin sehingga orang menjadi yakin akan dirinya. Hampir setiap orang membutuhkan hubungan sosial dengan orang lain. Kebutuhan ini terpenuhinya melalui pertukaran pesan yang berfungsi sebagai jembatan untuk mempersatukan manusia-manusia yang tanpa berkomunikasi akan terisolasi. Pesan-pesan itu mengemuka lewat perilaku manusia.²²

Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan.²³ Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.²⁴ Setiap keberadaan organisasi politik tentunya memiliki struktur dan setiap struktur memiliki fungsi. Begitupun partai politik, sebagai kerangka

²¹ Handoyo, Eko dkk, *Etika Politik dan Pembangunan*, (Semarang: Widya Karya, 2010), h. 41.

²² Roni Tabroni, *Komunikasi Politik Pada Era Multimedia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 4.

²³ Mirriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 403.

²⁴ Ibid, h. 403-405.

sistem politik tentunya memiliki struktur yang melahirkan fungsi-fungsi.²⁵ Fungsi-fungsi inilah yang menentukan eksis tidaknya suatu partai politik. Selain itu, fungsi juga menjadi parameter bagi identitas dan kredibilitas partai politik ditengah-tengah kompetisi politik masyarakat.²⁶

Dalam hal pengejawantahannya, fungsi partai politik akan berbeda satu sama lain, khususnya bila dikaitkan dengan beragamnya sistem politik yang lebih luas lagi seperti sistem politik yang dianut dan dijalankan oleh suatu negara.²⁷ Salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana komunikasi politik. Di masyarakat modern yang luas dan komplek, banyak ragam pendapat dan aspirasi yang berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara di padang pasir, apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan (*interest aggregation*). Sudah digabungkan, pendapat dan aspirasi tadi diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur. Proses ini dinamakan perumusan kepentingan (*interest articulation*).²⁸

Seandainya tidak ada yang mengagregasi dan mengartikulasi, niscaya pendapat atau aspirasi tersebut akan simpang siur dan saling berbenturan, sedangkan dengan agregasi dan artikulasi kepentingan kesimpangsiuran dan benturan dikurangi. Agregasi dan artikulasi itulah salah satu fungsi komunikasi

²⁵ A. A. Sahid Gatara, *Ilmu Politik: Memahami dan Menerapkan*, (bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 198.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Mirriam Budiardjo, *Op.Cit*, h. 405.

partai politik.²⁹ Komunikasi politik juga dapat diartikan “suatu penyampaian pesan politik yang secara sengaja dilakukan oleh komunikator kepada komunikan dengan tujuan membuat komunikan berperilaku tertentu”.³⁰ Sebelum suatu pesan politik dapat dikonstruksikan untuk disampaikan kepada komunikan dengan tujuan mempengaruhinya, dan harus terdapat pertimbangan. Kenyataan dalam kehidupan politik menunjukkan bahwa seorang pemimpin politik adalah orang yang memiliki kemampuan memobilisasi opini publik dan kegiatan memobilisasi opini publik adalah komunikasi.³¹

Dengan kata lain, tanpa adanya sebuah komunikasi yang baik niscaya sebuah organisasi apapun tidak akan mencapai tujuannya. Komunikasi politik disini adalah mutlak meliputi seluruh anggota/kader partai yang duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan masyarakat setempat yang dapat berupa penyampaian-penyampaian informasi, dan himbauan yang bersifat untuk meningkatkan hubungan masyarakat dan Anggota DPR. Partai politik selain menjelaskan atau mengkritisi program-program pemerintah (partai yang sedang berkuasa), melalui berbagai pertemuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, partai politik juga menyerap pandangan, ide, dan pemikiran masyarakat mengenai berbagai isu kenegaraan yang sedang berkembang. Pada partai politik yang dikembangkan secara sehat, terutama dalam masyarakat yang pilihan-pilihannya dilakukan diluar kerangka primordialisme dan patrimonialisme, ide-ide yang berkembang dalam masyarakat yang berhasil mereka serap, akan menjadi bahan

²⁹ *Ibid*, h. 406.

³⁰ Fitri Yanti, *Komunikasi Politik dan Politik Komunikasi Suatu Relasi dan Peran Media Masa*, Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam (TAPIS), Vol. 5 No. 3 (Januari-Juni 2007), *Op.Cit*,

³¹ *Ibid*.

pertimbangan yang penting didalam membuat keputusan-keputusan politik partai yang bersangkutan. Dengan berbagai kegiatan inilah sesungguhnya setiap anggota partai politik, sadar atau tidak sadar, telah melaksanakan fungsinya sebagai penghubung antara rakyat dengan pemerintah, baik dalam pengertian positif maupun negatif. Sebagaimana yang telah dikemukakan diawal tadi, bagaimana aspirasi masyarakat ini bisa tersalurkan kepada pemerintah, maka disinilah fungsi dari anggota partai politik yang akan menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa. Pemerintah Daerah juga harus dapat menampung semua aspirasi masyarakat untuk dapat diakomidir yang berasal dari usul ataupun kebijaksanaan partai dalam anggaran dan diproses sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari musrenbang desa, kecamatan, kabupaten/kota sampai ditingkat pusat dan pada akhirnya merupakan Kebijakan Umum (Public Policy) atau dalam bentuk RPJP/RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Pendek dan Menengah) yang kesemua ini adalah dalam kerangka pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Sebaliknya, anggota partai politik juga dapat menyampaikan dan menginformasikan kepada masyarakat, kegiatan atau program-program pemerintah dalam bentuk kebijaksanaan umum, dengan demikian kalau hal ini terjadi, maka akan terciptakan komunikasi politik dari bawah ke atas dan sebaliknya dari atas kebawah, dimana anggota partai politik dapat memainkan peranannya sebagai penghubung antara yang memerintah dengan diperintah, antara pemerintah dan warga masyarakat. Melihat hal diatas, partai politik dalam menjalankan fungsinya sering disebut sebagai broker (perantara) dalam suatu

bursa ide-ide (clearing house of ideas) dan bisa juga dikatakan bahwa partai politik bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar dan bagi warga masyarakat sebagai pengeras suara.

Anggota DPRD adalah perwakilan dari masyarakat dipilihnya masing-masing untuk mengamalkan Pancasila maka dari itu anggota dewan harus menjadi garda terdepan untuk mengaktualisasikan pancasila, tapi sejauh ini yang dilakukan hanya sebatas sosialisasi bukan aktualiasai, yang paling penting adalah bukti pengamalannya atau aktualisasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Suatu ideologi dapat mempunyai rumusan yang amat ideal dengan ulasan yang amat logis serta konsisten pada tahap nilai dasar dan nilai instrumentalnya. Akan tetapi, jika pada nilai praksisnya rumusan tersebut tidak dapat diaktualisasikan, maka ideologi tersebut akan kehilangan kredibilitasnya. Yang paling penting adalah bukti pengamalannya atau aktualisasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Suatu ideologi dapat mempunyai rumusan yang amat ideal dengan ulasan yang amat logis serta konsisten pada tahap nilai dasar dan nilai instrumentalnya. Akan tetapi, jika pada nilai praksisnya rumusan tersebut tidak dapat diaktualisasikan, maka ideologi tersebut akan kehilangan kredibilitasnya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, penulis akan merumuskan pokok permasalahan yang akan di bahas lebih lanjut dalam penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk aktualisasi nilai pascasila dalam komunikasi politik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir barat dengan masyarakat ?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat aktualisasi nilai-nilai pancasila dalam komunikasi politik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir barat dengan masyarakat ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah diatas, maka Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk Mengetahui wujud aktualisasi nilai pancasila dalam bentuk komunikasi politik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir barat dengan masyarakat.
2. Untuk mengetahui pentingnya aktualisasi nilai-nilai pancasila dalam komunikasi politik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir barat dengan masyarakat.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kajian tentang pancasila dalam komunikasi.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bernilai bagi pembaca tentang nilai pancasila dalam

komunikasi politik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kabupaten Pesisir barat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Dilihat dari tempat pelaksanaannya penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (Field Research). Menurut Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu kelompok sosial, individu, lembaga atau masyarakat.³² Sedangkan menurut M, Iqbal Hasan penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau responden.³³

Dalam prosesnya, penelitian ini mengangkat data dan permasalahan yang ada dilapangan yang dalam hal ini adalah komunikasi politik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir barat.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan dan menjelaskan suatu hal seperti kondisi apa adanya

³² *Ibid*, h. 46.

³³ M. Iqbal Hasan, *Metode penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 38.

yang ada dilapangan.³⁴ Jadi penelitian ini menggambarkan sifat-sifat suatu individu, gejala-gejala, keadaan dan situasi kelompok tertentu secara tepat. Menurut Sumradi Suryabrata penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian tertentu.³⁵

Menurut Cholid Naburko dan Abu Ahmadi Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto “apabila penelitian bermaksud untuk mengetahui keadaan suatu mengenai apa dan bagaimana, berapa banyak dan sejauh mana dan sebagainya, maka penelitiannya bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan atau menerangkan suatu peristiwa.”³⁶

Jadi sifat penelitian ini adalah deskriptif dan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, yaitu tentang komunikasi politik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir barat.

2. Sumber data

a. Data primer

Abdurrahmat Fathoni mengungkapkan bahwa data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.³⁷

³⁴ Prastya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Setiawan Pers, 1999), h. 60.

³⁵ Sumaradi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 76.

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1989), h. 117.

³⁷ Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta), h. 38.

Sumber data primer adalah data utama dalam suatu penelitian, digunakan sebagai pokok yang diperoleh melalui interview, observasi, dan dokumentasi, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir barat perwakilan dari masing-masing fraksi Yaitu:

- Fraksi PDIP :Piddinnuri
- Fraksi PKS-Grindra :Gusti Kadi Artawan
- Fraksi Demokrat :M. Towil
- Fraksi Pesisir Barat Bersatu :Aguscik

b. Data sekunder

Data sekunder menurut Abdurrahmat Fathoni adalah data yang sudah jadi, biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya mengenai data demografis suatu daerah dan sebagainya.³⁸

sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari buku-buku literatur dan informan lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Adapun informan lain yaitu masyarakat Kabupaten Pesisir Barat.

3. Alat Pengumpul Data

Untuk mengetahui data sesuai dengan tujuan penelitian yang objektif, maka penulis menggunakan metode interview, metode observasi, dan metode dokumentasi.

³⁸ *Ibid*, h, 60.

a. Metode interview (wawancara)

Metode interview wawancara menurut Usman dan Purnomo Setiady Akbar adalah “tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung”.³⁹ Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview adalah sebagai berikut:

1. Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar apa adanya dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
3. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.⁴⁰

Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto, interview adalah “metode penyarian data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian”.⁴¹

Dari beberapa pendapat diatas, dapat penulis simpulkan bahwa interview atau wawancara adalah metode tanya jawab antara pewawancara sebagai

³⁹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 57.

⁴⁰ Sugiyono, *Prosedur Penelitian: Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 194.

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1989), h. 132.

pengumpul data terhadap nara sumber sebagai responden secara langsung untuk memperoleh informasi atau keterangan yang diperlukan.

Metode interview dibagi menjadi tiga macam yaitu :

1. interview terpimpin,
2. Interview tak terpimpin, dan
3. Interview bebas terpimpin.⁴²

Adapun metode interview yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode interview terpimpin yaitu metode interview yang menggunakan pertanyaan untuk diajukan kepada subyek penelitian namun iramanya diserahkan kepada kebijakan pewawancara.

Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam penelitian ini menggunakan metode interview terpimpin sebagai metode pokok untuk memperoleh data yang penulis peroleh dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir barat untuk mengetahui bentuk komunikasi politik dan efektifitas komunikasi politik yang dilakukan.

b. Metode Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian untuk mengetahui dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi menurut Kartini Kartono adalah “studi yang sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan

⁴² *Ibid*, h. 133.

pencatatan”.⁴³ Sedangkan Karl Weick, mendefinisikan observasi sebagai “penelitian, pengubahan, pencatatan dan penandaan serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme tertentu, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris”.⁴⁴

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

Metode observasi dibagi menjadi dua macam yaitu :

1. Observasi berperan serta (participant observation)

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari yang sedang diamati atau yang sedang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melaksanakan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini maka data yang diperoleh akan lebih akurat, lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

2. Observasi nonpartisipan

Jika dalam observasi partisipan peneliti terlibat langsung aktivitas orang-orang yang sedang diamati, maka dalam observasi nonpartisipan ini

⁴³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 157

⁴⁴ Jallaludin Rahmad, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), h. 83.

peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen saja.⁴⁵

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi nonpartisipan yang maksudnya adalah mengadakan pengamatan terhadap obyek penelitian dalam melakukan aktifitasnya.

c. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal variable yang berupa catatan atau dokumen, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.”⁴⁶ Adapun dalam penelitian ini metode dokumentasi penulis gunakan untuk memperoleh data tentang :

- a. Keadaan jumlah anggota masyarakat Kabupaten Pesisir barat.
- b. Dokumentasi-dokumentasi dari program kerja atau kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir barat.

4. Teknik Pengolahan

Data Mengolah data yaitu “menimbang mengatur dan mengklasifikasi”.⁴⁷ Jadi dalam hal ini yang dimaksud pengolahan data adalah memilih secara hati-hati, menggolongkan, menyusun, dan mengatur data yang relevan, tepat dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam pengolahan data ini adalah :

1. Pemeriksaan (editing)

⁴⁵ Sugiono, *Op.Cit*, h. 204.

⁴⁶ Jallaldin, *Op.it*, h. 97.

⁴⁷ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 91.

Yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dianggap lengkap, relevan, jelas lalu data tersebut dijabarkan dengan bahasa yang lugas dan mudah difahami.

2. Penandaan data (coding)

Yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh baik berupa penomoran, penggunaan data, atau kata tertentu yang menunjukkan golongan, kelompok klasifikasi dan menurut jenis atau sumbernya dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna memudahkan rekonstruksi serta analisa data.

3. Penyusunan sistem data (sistemizing)

Yaitu menguraikan hasil penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Menempatkan data menurut kerangka sistematika berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini yaitu mengelompokkan data secara sistematika, data yang diedit dan diberi tanda, menurut klarifikasi dan urutan masalah.⁴⁸

5. Teknik Analisa Data

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, menurut Suharsimi Arikunto analisa kualitatif digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan dan

⁴⁸ *Ibid*, h. 93.

diangkat sekedar untuk mempermudah dua penggabungan dua variabel, selanjutnya dikualifikasikan kembali.⁴⁹

Setelah data tersebut diolah, kemudian dapat dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu “berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit dan tarik kesimpulan yang bersifat umum ke khusus”.⁵⁰

Jadi karena data yang akan dianalisis merupakan data kualitatif yang mana cara menganalisisnya menggambarkan kata-kata atau kalimat sehingga dapat disimpulkan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode berfikir induktif, untuk menarik kesimpulan dari data yang diperoleh yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit dan umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

6. Tinjauan Pustaka

Guna mendukung penelaahan lebih lanjut sebagaimana yang dikemukakan pada latar belakang masalah di atas maka penulis berusaha untuk melakukan penelaahan lebih awal terhadap sumber-sumber data pustaka yang ada:

- a. Buku karangan Dr. Idrus Ruslan, M.Ag yang berjudul, “NEGARA MADANI, AKTUALIASAI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA ”, buku tersebut berfokus pada gagasan pengembangan wacana masyarakat madani

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Op.it*, h. 209.

⁵⁰ Nana Sujana, *Karya Ilmiah Makalah, Skripsi dan disertasi*, (Bandung: Sinar Baru, 1987), h. 6.

dengan berdasarkan aktualisasi nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

- b. Buku karangan Yudi Latif yang berjudul, "Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Aldualitas Pancasila", Buku 'Negara paripurna bicara tentang tiga hal: historisitas, rasionalitas dan aktualitas Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara, filosofische grondslag, filsafat dasar Republik Indonesia, bukanlah sesuatu yang lahir begitu saja. Pancasila sebagai mahakarya para pendiri bangsa memiliki pijakan historisitas, rasionalitas dan aktualitas yang khas. Pancasila lahir dari daya kritis dan daya konsensus para pendiri bangsa untuk menemukan kesepakatan asas-asas moral berdirinya Republik Indonesia.
- c. Buku karangan As'ad Said Ali yang berjudul "Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa" Lewat buku ini As'ad tidak hanya merunut dari awal terumuskannya Pancasila hingga pejalanannya melalui Demokrasi Terpimpin-nya Bung Kamo; Orba-nya Pak Harto; sampai dengan era "reformasi" sekarang ini, tapi juga mencoba meyakinkan akan pentingnya Pancasila dewasa ini. As'ad berusaha keras menjelaskembangkan pengertian Pancasila tidak hanya sebagai ideologi dan dasar negara, tapi juga membahas kaitan di antara Pancasila dengan Agama, menjelasjabarkan sila-silanya, bahkan menjelaskan secara rinci ideologi-ideologi lain yang "mengepung" Pancasila. Pendek kata, buku ini tidak hanya mencoba mengembalikan

"citra Pancasila", tapi juga berusaha membuktikan pentingnya Pancasila bagi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini maupun di masa akan datang.



BAB II

PANCASILA DAN BENTUK KOMUNIKASI POLITIK

A. Pancasila

1. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dan Negara

Istilah Ideologi berasal dari idea yang berarti gagasan, konsep , pengertian dasar, cita-cita dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harafiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar, ide atau cita-cita . Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang tetap sifatnya dan harus dapat dicapai sehingga cita-cita itu sekaligus merupakan dasar, pandangan, dan paham. Ideologi yang semula berarti gagasan, ide, cita-cita itu berkembang menjadi suatu paham mengenai seperangkat nilai atau pemikiran yang oleh seseorang atau sekelompok orang menjadi suatu pegangan hidup.

A.S. Homby menyatakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan yang membentuk landasan teori ekonomi dan politik atau yang dipegangi oleh seseorang atau sekelompok orang. Frans Magnis Suseno mengatakan bahwa ideologi sebagai suatu sistem pemikiran yang dapat dibedakan menjadi ideologi tertutup dan ideologi terbuka.

Ideologi tertutup merupakan suatu sistem pemikiran tertutup. Ciri-cirinya: merupakan cita-cita suatu kelompok orang yang mengubah dan memperbaiki masyarakat; atas nama ideologi dibenarkan pengorbanan-pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat; isinya bukan hanya nilai-nilai dan cita-cita

tertentu, melainkan terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras, yang diajukan dengan mutlak.

Ideologi terbuka merupakan suatu pemikiran yang terbuka. Ciri-cirinya: bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dapat dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari moral, budaya masyarakat itu sendiri; dasarnya bukan keyakinan ideologi sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dari konsensus masyarakat tertentu; nilai-nilai itu sifatnya dasar, secara garis besar saja sehingga tidak langsung operasional.

Fungsi utama ideologi dalam masyarakat menurut Ramlan Surbakti (1999) ada dua, yaitu: sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai secara bersama oleh suatu masyarakat dan sebagai pemersatu masyarakat dan karenanya sebagai prosedur penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat.

Sumber semangat yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah terdapat dalam penjelasan UUD RI Tahun 1945: *terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat mengubah dan mencabutnya.*

Ada tiga dimensi sifat ideologi yaitu dimensi realita, dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas:

- a) Dimensi Realitas: nilai yang terkandung dalam dirinya, bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, terutama pada waktu ideologi itu lahir,

sehingga mereka betul-betul merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka bersama. Pancasila mengandung sifat dimensi realitas di dalam dirinya.

b) Dimensi idealisme: ideologi itu mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila bukan saja memenuhi dimensi idealisme ini, tetapi juga berkaitan dengan dimensi realitas.

c) Dimensi fleksibilitas: ideologi itu memberikan penyegaran, memelihara, dan memperkuat relevansinya dari waktu ke waktu sehingga bersifat dinamis dan demokratis. Pancasila memiliki dimensi fleksibilitas karena memelihara dan memperkuat relevansinya dari masa ke masa.

1) Faktor Pendorong Keterbukaan Ideologi Pancasila

a. Kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang secara cepat.

b. Kenyataan menunjukkan bahwa kebangkrutan ideologi yang tertutup dan beku cenderung meredupkan perkembangan dirinya.

c. Pengalaman sejarah politik masa lampau

d. Tekat untuk memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi dan hasrat mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional.

2) Sekalipun Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka, namun ada batas-batas keterbukaan yang tidak boleh dilanggar, yaitu:

- a. Stabilitas nasional yang dinamis.
- b. Larangan terhadap ideologi marxisme, leninisme, dan komunisme.
- c. Mencegah berkembangnya paham liberalisme.
- d. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan bermasyarakat.
- e. Penciptaan norma-norma baru harus melalui konsensus.

3) Makna pancasila sebagai Ideologi Bangsa

Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang ber-Ketuhanan, yang ber-Kemanusiaan, yang ber-Persatuan, yang ber-Kerakyatan, dan yang ber-Keadilan.

Pancasila sebagai ideologi nasional selain berfungsi sebagai cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara juga merupakan nilai yang disepakati bersama, karena itu juga berfungsi sebagai sarana pemersatu masyarakat yang dapat mempersatukan berbagai golongan masyarakat di Indonesia.

A. Makna Pancasila sebagai Ideologi Bangsa

Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang ber-Ketuhanan, yang ber-Kemanusiaan, yang ber-Persatuan, yang ber-Kerakyatan, dan yang ber-Keadilan.

Pancasila sebagai ideologi nasional selain berfungsi sebagai cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai yang disepakati bersama, karena itu juga berfungsi sebagai sarana pemersatu masyarakat yang dapat mempersatukan berbagai golongan masyarakat di Indonesia.

Dengan demikian, Pancasila telah dapat diterima oleh masyarakat dan menjadi pilihan bangsa sebagai dasar serta pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara Republik Indonesia termasuk jalannya hukum negara Indonesia.

B. Pengertian Pancasila sebagai Ideologi Negara

Nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya merupakan nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber nilai bagi manusia Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, maksudnya sumber acuan dalam bertindak laku dan bertindak dalam menentukan dan menyusun tata aturan hidup berbangsa dan bernegara.

2. Eksistensi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

1. Hakikat, Kedudukan dan Nilai-nilai yang Terkandung dalam Pancasila

Sebuah negara membutuhkan landasan filosofis untuk menyusun tujuan negara. Keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dewasa ini mendapat sorotan publik. Berbagai pendapat negatif terkait Pancasila perlu diluruskan agar tidak terseret pada dogma-dogma menyesatkan.

Bangsa Indonesia mengenal istilah Pancasila jauh sebelum Indonesia merdeka. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Secara harafiah Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu “Panca” yang berarti lima dan “Sila” yang berarti aturan yang melatarbelakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan sesuai dengan adab yang dijadikan sebagai dasar. Karena itu, Pancasila berarti rangkaian lima aturan tentang dasar-dasar atau prinsip-prinsip petunjuk perilaku dan perbuatan masyarakat Indonesia. Kelima sila tersebut kemudian berperan menjadi pandangan hidup, keyakinan, atau cita-eita bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai dasar dalam mengambil suara keputusan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia.⁵¹

Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diterima secara luas dan telah bersifat final. Hal ini kembali ditegaskan dalam Ketetapan MPR No XVIII/MPR/ 1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No.II/MPR/197 8 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila sebagai Dasar Negara Ketetapan MPR

⁵¹ Tobroni dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM, Civil Society, dan Multikulturalisme* (Pusapom: Malang, 2007), h. 8.

No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Selain itu, Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kesepakatan bersama para founding fathers yang kemudian sering disebut sebagai sebuah “Perjanjian Luhur” bangsa Indonesia.

Namun, dibalik itu terdapat sejarah panjang perumusan sila-sila Pancasila dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia. Pembahasan sejarah perumusan Pancasila begitu sensitif dan dapat mengancam keutuhan Negara Indonesia. Hal ini dikarenakan begitu banyak polemik serta kontroversi yang akut dan berkepanjangan baik mengenai siapa pengusul pertama sampai dengan pencetus istilah Pancasila. Buku ini sedapat mungkin menghindari polemik dan kontroversi tersebut. Oleh karena itu, substansinya lebih bersifat suatu ”perbandingan” (bukan “pertandingan”) antara rumusan satu dengan yang lain yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang berbeda. Penempatan rumusan yang lebih awal tidak mengurangi substansi dan orisinalitas fakta sejarah yang ada.

Dari kronik sejarah setidaknya ada beberapa rumusan Pancasila yang pernah muncul. Rumusan Pancasila yang satu dengan rumusan yang lain ada yang berbeda namun ada pula yang sama. Secara berturut-turut akan dikemukakan rumusan dari Moh. Yamin, Soekarno, Piagam Jakarta, hasil BPUPKI, hasil PPKI, Konstitusi RIS, UUD sementara, UUD 1945 (Dekrit Presiden 5 Juli 1959), versi berbeda, dan versi populer yang berkembang di masyarakat.

Pancasila merupakan hasil pemikiran para pendiri bangsa yang biasa dikenal dengan Piagam Jakarta. Dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia⁵² yaitu :

- Lima Dasar oleh Mohammad Yamin, yang berpidato pada tanggal 29 Mei 1945. Yamin merumuskan lima dasar sebagai berikut: Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Pen' Ketuhanan, Peri kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Dia menyatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia Mohammad Hatta dalam memonya meragukan pidato Yamin tersebut.
- Panca Sila oleh Soekarno yang dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno mengemukakan dasar-dasar sebagai berikut: Kebangsaan, Intemasionalisme, Mufakat, Dasar Perwakilan, Dasar Permusyawaratan, Kesejahteraan, dan Ketuhanan. Nama Pancasila itu diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juli itu, katanya: *Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan. inlemasionalisme. mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa-namanya adalah Pancasila. Sila*

⁵² Anonim, *Sejarah Lahirnya Pancasila*. <http://indoskripsi.com>, diakses tanggal 20 November 2019

artinya azas atau dasar, dan diatas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi.

Setelah Rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi beberapa dokumen penetapannya adalah:

- Rumusan Pertama: Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945
- Rumusan Kedua: Pembukaan Undang-Undang Dasar tanggal 18 Agustus 1945
- Rumusan Ketiga: Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tanggal 27 Desember 1949
- Rumusan Keempat: Mukaddimah Undang-Undang Dasar Sementara tanggal 15 Agustus 1950
- Rumusan Kelima: Rumusan Kedua yang dijiwai oleh Rumusan Pertama (merujuk Dekrit Presiden 5 Juli 1959).

Piagam Jakarta merupakan kristalisasi dari kebudayaan bangsa Indonesia yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi para pendiri bangsa untuk membentuk suatu negara merdeka yang lebih baik. Pancasila lahir dari kebudayaan bangsa Indonesia, bukan berasal dari negara lain. Sehingga pada hakeknya Pancasila merupakan manifestasi bangsa Indonesia yang sudah tumbuh dalam jiwa manusia Indonesia dan kemudian di aplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konstruksi UUD 1945 secara eksplisit tidak menjelaskan tentang kata Pancasila. Namun, secara implisit sila-sila yang terkandung dalam Pancasila tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat berbunyi, “Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai Pancasila secara sah diakui oleh Bangsa Indonesia dan dijadikan sebagai dasar dalam mencapai tujuan negara. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang disepakati sejak bangsa Indonesia memproklamasikan diri sebagai negara yang merdeka baik dari politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-kemanan pada tanggal 17 Agustus 1945. Segala pengaturan penyelenggaraan kehidupan kenegaraan harus mengacu pada Pancasila.

Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, selanjutnya dituangkan dalam batang tubuh UUD 1945 dalam bentuk pasal-pasal, kemudian dituangkan dalam wujud berbagai peraturan perundang-undangan lainnya secara tertulis. Sedangkan, peraturan lainnya yang tidak tertulis terpelihara dalam konvensi atau kebiasaan warga dan tata negaraan. Dalam kaitannya Pancasila mempunyai sifat mengikat dan kesehamsan atau bersifat imperatif,

artinya sebagai norma hukum yang tidak boleh dilanggar dikesampingkan.⁵³

Nilai-nilai dasar dalam Pancasila yakni nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Adapun penjelasan

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Kata kunci dalam sila pertama ini adalah Tuhan. Hal ini dapat diinterpretasikan sesuai dengan hakekat dan sifat-sifat Tuhan. Sehingga, bangsa Indonesia harus percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa apa pun keyakinan dan agamanya terserah, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam suatu negara yang demokratis tidak dibenarkan adanya pemaksaan agama. Setiap warga negara berhak memeluk agama dan kepercayaan masing-masing berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga, tercipta keljasama antara pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda menuju Tri Kerukunan umat beragama, antara lain kerukunan intern umat beragama, kerukunan antara umat beragama dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Dalam sila pertama terkandung nilai Ketuhanan antara lain:

- a. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- b. Membina kerukunan hidup antara sesama umat pemeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

⁵³ Maksudnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut tidak dapat dikesampingkan. Lihat juga Tobroni, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM, Civil Society, dan Multikulturalisme.....*, h. 12

- c. Kebebasan memeluk agama merupakan hak yang bersifat asasi sehingga tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terhadap orang lain
- d. Nilai sila pertama menjiwai nilai sila kedua, ketiga, keempat dan kelima

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua merupakan kesesuaian dengan hakekat manusia. Hanya orang yang sadar akan dirinya adalah manusia yang akan bisa memperlakukan orang lain sebagai manusia makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya sikap saling menghargai setiap manusia, maka akan timbul persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membedakan suku, agama, ras dan jenis kelamin. Hormat menghormati, saling bekerjasama, tenggang rasa, dan teposeliro merupakan sebagian perwujudan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan antara lain:

- a. Pengakuan terhadap martabat manusia
- b. Perlakuan yang adil terhadap sesama manusia
- c. Pengertian manusia yang beradab, memiliki daya cipta, rasa dan karsa serta keyakinan, sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan

- d. Nilai sila kedua ini dijiwai sila pertama, dan menjiwai sila ketiga, keempat serta kelima.

3. Persatuan Indonesia

Pengakuan terhadap nilai-nilai Kemanusiaan berdasarkan Ketuhanan adalah modal awal bagi terciptanya persatuan bangsa Indonesia. Sikap yang mampu menempatkan kepentingan bangsa Indonesia di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta persatuan Indonesia atas dasar Bhineka Tunggal Ika. Pada sila ketiga terkandung nilai peraturan bangsa antara lain:

- a. Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia
- b. Bangsa Indonesia adalah bangsa persatuan suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia
- c. Pengakuan terhadap ke-Bhineka Tunggal Ika-an suku bangsa (etnis) dan kebudayaan bangsa yang berbeda.
- d. Nilai sila ketiga dijiwai sila pertama dan kedua serta menjiwai sila keempat dan kelima

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap bangsa Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Setiap warga negara

berhak mendapatkan penghidupan yang layak, pendidikan dan pengakuan keagamaan. Kerakyatan merupakan kata kunci pada sila keempat. Hal ini berarti rakyat mempunyai kedudukan yang tinggi dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Kedaulatan negara ditangan rakyat, maka segala keputusan diutamakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat antara lain:

- a. Kedaulatan negara ditangan rakyat
- b. Dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi atau golongan
- c. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur
- d. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang amanahnya untuk melaksanakan permusyawaratan
- e. Sila keempat dijiwai sila pertama, kedua dan ketiga serta menjiwai sila kelima.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Hakekat dari sila kelima adalah adil, yaitu kesesuaian dengan hakekat adil. Kata adil dapat diartikan dengan tidak memihak, memberikan yang bukan hak, mengambil hak, adil terhadap diri sendiri dan orang lain. Perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dalam bidang sosial terutama meliputi bidang-bidang

ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan dan keamanan nasional.

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima meliputi:

- a. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama
- b. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan
- c. Cinta akan kemajuan dan pembangunan
- d. Sila kelima dijiwai sila pertama, kedua, ketiga dan keempat

Apabila diuraikan lebih jauh, pemahaman mengenai hakekat Pancasila menghasilkan suatu kesimpulan bahwa sila-sila yang terdapat dalam Pancasila antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan (koheren) dan tidak dapat diputarbalikkan (konsistensi).

Gambar piramida tersebut menunjukkan bahwa sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang utuh dan sistematis. Apabila nilai-nilai normatif dalam Pancasila tersebut dilanggar maka yang bersangkutan dikenai sanksi hukum. Misalnya jika ada warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana korupsi, pembunuhan, perampokkan, pemerkosaan, penghinaan dan lainnya maka orang tersebut akan dikenai hukuman sesuai dengan berat-ringannya tindak pidana yang dilakukannya.⁵⁴ Nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi jembatan persatuan dan kesatuan bangsa. Apabila jiwa manusia Indonesia tidak menaikkan nilai-nilai Pancasila maka akan menjadi jembatan penghubungan

⁵⁴ Tobroni, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM, Civil Society, dan Multikulturalisme.....*, h. 12

persaudaraan antar suku. Sehingga pelanggaran terhadap hukum maupun konflik suku, ras antar golongan dapat dihindarkan.

2. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka, Dinamis, dan Remofmatif

Pengertian ideologi secara harfiah berarti a system of ideas yakni suatu rangkaian ide yang terpadu menjadi satu. Horton dan Hunt (dalam Margono dkk)⁵⁵ mengartikan ideologi sebagai suatu sistem gagasan yang menyetujui seperangkat norma bertalian dengan Newman yang memberi pengertian ideologi sebagai seperangkat gagasan yang menjelaskan atau melegalsasikan tatanan sosial, struktur kekuasaan atau cara hidup dilihat dari segi tujuan, kepentingan atau status sosial dari kelompok atau kolektivitas dimana ideologi itu muncul. Selanjutnya Mubyarto⁵⁶ menjelaskan bahwa ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan dan simbol-simbol kelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau pedoman untuk mencapai tujuan bangsa itu. Dari berbagai tindakan tersebut Margono dkk, menyimpulkan ideologi sebagai seperangkat ide dasar masyarakat dan bangsa yang menjadikan pegangan dalam mencapai tujuan atau cita-cita bersama. Karakterisasi ideologi sebagai pandangan dirumuskan sebagai berikut:

- a. Ideologi sering kali muncul dan berkembang dalam situasi krisis
- b. Ideologi memiliki jangkauan yang luas, beragam dan terprogram
- c. Ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan

⁵⁵ Margono dkk, *Pendidikan Pancasila* (Malang: UM Press, 2002), h. 74.

⁵⁶ *Ibid*, h. 78.

- d. Ideologi memiliki pola pemikiran yang sistemis
- e. Ideologi cenderung eksklusif, absolut dan universal
- f. Ideologi memiliki sifat empiris dan normatif
- g. Ideologi dapat dioperasionalkan dan didokumentasikan konseptualisasinya
- h. Ideologi biasanya terjalin dalam gerakan-gerakan politik⁵⁷

Berdasarkan pendapat beberapa tokoh tersebut diatas penulis dapat menarik benang merah bahwa yang dimaksud dengan ideologi adalah gagasan atau ide yang bersumber dari sekelompok manusia yang mempunyai tujuan yang sama dan kemudian dijadikan sebagai penunjuk arah segala keputusan yang diambil. Fungsi ideologi bagi suatu bangsa antara lain:

- a) Sebagai sarana untuk memformulasikan dan mengisi kehidupan manusia secara individual
- b) Sebagai jembatan pergeseran kendali kekuasaan dari generasi tua (founding fathers) dengan generasi muda
- c) Sebagai kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi individu, masyarakat, dan bangsa untuk menjalani kehidupan dalam mencapai tujuan.

Pancasila sebagai pandangan hidup atau ideologi bangsa Indonesia dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan norma-norma kehidupan, baik

⁵⁷ *Ibid*, h. 75

agama, kesusilaan, hukum, maupun sopan santun yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan hasil sebuah aufklarung yang mendalam mengenai masa depan yang dicita-citakan bangsa Indonesia serta prinsip hidup yang melandasi kehidupan bangsa dan negara sesuai dengan cita-cita masa depan bangsa Indonesia. Suatu pandangan hidup selalu mengandung isi tentang konsep-konsep dasar mengenai masa depan dan cita-cita yang diharapkan serta cara pencapaiannya secara prinsipal. Pancasila merupakan pandangan hidup yang harus dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan gerakan-gerakan dalam hidup karena secara historis Pancasila merupakan kristalisasi nilai yang telah lama ada dan hidup serta berkembang dalam akar pribadi dan budaya bangsa Indonesia.

Sebagai ideologi, Pancasila bersifat terbuka, dinamis dan formatif. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki arti bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai dasar tetap berlaku universal dan tidak langsung bersifat operasional. Arti kata terbuka menurut Poespowardojo dalam Tobroni⁶⁰ bahwa nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tersebut bisa dimaknai, dijabarkan dan interpretasi secara kritis, kreatif, dan rasional oleh bangsa Indonesia sehingga mudah dioperasionalkan menurut Kaelan⁶¹, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi “terbuka” adalah sebagai berikut:

- a. Nilai dasar, yaitu hakekat kelima sila Pancasila tersebut
- b. Nilai instrumental, yang merupakan arahan, kebijakan strategi, sasaran serta lembaga pelaksanaannya

- c. Nilai praktis, yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi pengalaman yang bersifat nyata, dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat berbangsa dan bernegara.

Berbeda dengan indikator ideologi terbuka yang mempunyai prinsip-prinsip antara lain:

- a. Bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat
- b. Bukan berupa nilai dan cita-cita
- c. Kepercayaan dan kesetiaan yang kaku. Pancasila bukanlah ideologi yang tertutup karena indikator dari ideologi tertutup tersebut bertolak belakang dengan Pancasila
- d. Terdiri atas tuntunan konkret dan operasional yang diajukan secara mutlak

Argumentasi bangsa Indonesia menggunakan ideologi adalah karena sebuah negara memerlukan sebuah ideologi untuk menjalankan sistem pemerintah yang ada pada negara tersebut, dan masing-masing negara berhak menentukan ideology apa yang paling tepat untuk digunakan, dan di Indonesia yang paling tepat adalah ideologi terbuka karena Indonesia menganut sitem pemerintahan demokratis yang didalamnya membebaskan setiap masyarakat untuk berpendapat dan melaksanakan sesuatu sesuai dengan keinginannya masing-masing. Maka dari itu, ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah yang paling tepat digunakan oleh Indonesia.

Selanjutnya, dikatakan sebagai ideologi yang dinamis, karena nilai-nilai dalam Pancasila tersebut perlu dikembangkan sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan manusia Indonesia. Nilai-nilai dasar yang tetap dalam Pancasila selalu mengisi segala bentuk perubahan kehidupan manusia Indonesia. Dinamisasi nilai-nilai Pancasila itu penting agar Pancasila tidak menjadi beku, kaku dan membelenggu.

Pancasila dianggap sebagai ideologi yang reformatif memiliki arti bahwa nilai-nilai dalam Pancasila itu secara operasional bisa bersifat aktual, antisipatif, adaptif dan bisa diperbarui maknanya. Pembaruan makna bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar tetap yang terkandung didalamnya, tetapi mengeksplisitkan wawasan dan kandungan secara konkrit sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang senantiasa muncul dan berkembang seiring dengan aspirasi rakyat, perkembangan IPTEK, dan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia secara luas. Dewasa ini bukti bahwa Pancasila sebagai ideologi yang reformatif dapat dilihat dengan munculnya banyak partai politik, perubahan terhadap UUD 1945, dan persamaan kedudukan dihadapan hukum yang sekarang gencar ditegakkan.

3. Pancasila Sebagai Moral Pembangunan

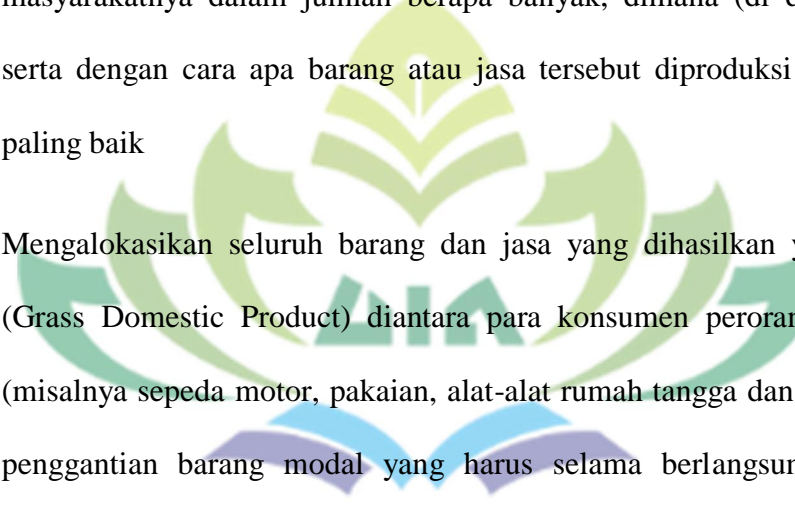
Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merasa materiil, spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat,

adil dan makmur, rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Pada hakekatnya pembangunan merupakan upaya untuk melakukan perubahan dari suatu kondisi ke kondisi yang lebih baik. Setiap negara membutuhkan pembangunan untuk melakukan perubahan sosial menuju ke suatu tujuan yang ditentukan dan disepakati bersama. Perubahan yang dilaksanakan dapat bersifat evolusi dan revolusi. Perubahan menuju ke arah yang dicita-citakan itu biasa dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan berbagai upaya dilakukan secara konstruktif dan terencana untuk cita-cita masyarakat atau tujuan nasional. Agar semua itu bisa terwujud dan terlaksana sesuai dengan kehendak dan cita-cita masyarakat, pembangunan harus berlandaskan kepada ideologi bangsa yang bersangkutan. Maka dari itu pembangunan di Indonesia berdasarkan Pancasila.

Pembangunan nasional Indonesia berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Demikian halnya dengan pelaku-pelaku pembangunan, segala aktivitas hendaknya diupayakan untuk mencapai tujuan hidup bersama, bukan hanya demi kepentingan sesaat masing-masing pihak. Pancasila juga dijadikan dasar berperilaku serta bersikap pelaku pembangunan. Apabila hal itu tidak dilakukan pembangunan nasional tidak akan berjalan dengan lancar dan sesuai kepentingan rakyat.

Suatu pembangunan nasional secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada landasan falsafah bangsa yang menjadi keyakinan dan budaya masyarakat yang bersangkutan. Falsafah yang diyakini dan telah berakar dalam masyarakat adalah dasar semua tingkah laku masyarakat. Demikian halnya pembangunan nasional dalam bidang ekonomi. Masyarakat dengan sistem perekonomian bentuk apa pun selalu memiliki empat tugas pokok dalam pembangunan bidang ekonomi sebagai berikut:⁵⁸

- 
- a. Menentukan barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan dalam masyarakatnya dalam jumlah berapa banyak, dimana (di daerah mana) serta dengan cara apa barang atau jasa tersebut diproduksi dengan cara paling baik
 - b. Mengalokasikan seluruh barang dan jasa yang dihasilkan yaitu: (GDP) (Gross Domestic Product) diantara para konsumen perorangan/individu (misalnya sepeda motor, pakaian, alat-alat rumah tangga dan sebagainya); penggantian barang modal yang harus selama berlangsungnya proses produksi (bangunan, jalan, mesin, peralatan, dan sebagainya); serta pertumbuhan ekonomi dimasa datang melalui investasi baru atau tambahan net untuk cadangan modal
 - c. Menetapkan bagaimana pendistribusian semua keuntungan (pendapatan nasional) diantara anggota masyarakat, dalam bentuk gaji, pembayaran, bunga, sewa, pembagaian laba, dan sebagainya

⁵⁸ Margono Dkk, Opcit, h. 84.

- d. Siapa yang membuat keputusan yang menyangkut produksi dan distribusi pendapatan nasional dan untuk siapa keputusan tersebut dibuat

Upaya untuk melaksanakan keempat tugas tersebut dilaksanakan dengan cara menjalankan sistem ekonomi. Mulai dengan cara desentralisasi dalam pengambilan keputusan dengan berpedoman pada batas-batas pemilikan sumber daya swasta (kapitalisme pasar) sampai perencanaan terpusat dan pengawasan atas pemilikan sumber daya oleh masyarakat (ekonomi sosialis).

Bagaimana dengan perekonomian sekarang apakah tetap berdasarkan Pancasila? Jawabnya YA. Secara teoritis dasar perekonomian negara Indonesia Pasal 33 UUD 1945 yang tentunya merupakan penjabaran lebih lanjut dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Substansi Pancasila ada pada alinea ke IV). Namun, dalam tataran praktis perekonomian Indonesia sedikit banyak bergerak ke arah neo-liberalisme, karena pengaruh arus globalisasi dan menyosong Asean Free Trade Area Tahun 2010. Selain itu, permasalahan urgen bidang perekonomian sekarang adalah meningkatnya budaya konsumerisme yang lebih menyukai produk luar negeri. Budaya konsumerisme yang sedang melanda bangsa Indonesia menyebabkan rendahnya tingkat produktivitas masyarakat, karena mereka cenderung lebih suka menghabiskan nilai guna barang dibandingkan mengembangkan produksi. Hal ini dapat diatasi dengan menetapkan suatu gagasan revolusioner pembangkit semangat kewirausahaan yang dapat membantu perekonomian negara. Misalnya saja baru-baru ini diterapkannya hari batik nasional setiap tanggal 1 Oktober. Gerakan ini mendorong pengerajin batik

untuk meningkatkan kualitas produksinya agar mampu bersaing di tingkat internasional.

5. Pancasila Sebagai Sistem Etika

Pembahasan mengenai etika tentu tidak dapat dilepaskan dari nilai. Nilai adalah apa yang dianggap bernilai atau berharga yang menjadi landasan, pedoman, pegangan, dan semangat seorang dalam melaksanakan sesuatu. Nilai dapat dipandang sebagai apa yang berharga yang dijadikan standar berkelakuan. Standar berkelakuan yang dimaksud dapat berwujud agama (dosa-pahala, halal-haram, benar-salah, menurut agama); etika (hak-kewajiban, bermoral-tidak bermoral, adil-tidak adil, jujur-tidak jujur, tanggung jawab-tidak tanggung jawab dan lain sebagainya); estetika (indah-tidak indah, bagus-buruk, pada tempatnya-tidak pada tempatnya); hukum (sah-tidak sah, boleh-tidak boleh secara hukum, sesuai peraturan-melanggar peraturan dan sebagainya).

Hakekat nilai menurut Djahari dalam Margono⁵⁹ dirumuskan sebagai harga, makna, isi dan pesan, semangat atau jiwa yang tersurat atau yang tersirat dalam fakta, konsep dan teori sehingga bermakna secara fungsional. Fungsi dan nilai kegunaan itu adalah untuk melandasi, mengarahkan, mengendalikan dan menentukan kelakuan seseorang. Ada perilaku-perilaku yang berlandaskan dan diarahkan oleh nilai yang dihargai pelakunya dan ada juga kelakuan-kelakuan yang tanpa berlandaskan nilai. Hal ini bisa saja karena bersifat mekanis atau behavioristik, ikut-ikutan atau karena asal-asalan. Misalnya buku ilmiah yang

⁵⁹ *Ibid. Op.Cit*, h. 64.

populer adalah suatu barang yang bernilai tinggi bagi para penstudi, sehingga adanya suatu buku sangat berharga bagi para penstudi (ke sekolah/kampus membaca buku sebagai penambah ilmu pengetahuan).

Nilai bersifat relatif karena senantiasa mengacu pada penilaian baik-buruk, benar-salah, wajar-tidak wajar dan lainnya dengan penggunaan standar-standar penilaian tertentu. Karena banyaknya standar penilaian, maka penilaian baikburuk, benar-salah, adil-tidak adil, maka masing-masing orang dapat saja menganggap apa yang bernilai itu berbeda karena berbeda standar penilaian. Namun demikian, secara umum ada juga nilai-nilai yang dipandang universal misalnya nilai kebenaran atau kebaikan. Hal ini berarti siapa pun mengakui nilainya. Ada yang menyebut nilai universal sebagai nilai dasar atau nilai subjektif, nilai kkhhusus, atau nilai instrumental yakni nilai yang sudah mempunyai warna secara khusus yang warna dan isi pesannya sesuai dengan kelompok manusia dan kondisi penganutnya masing-masing, yang nilai kebenaran dan kebaikannya bisa saja bersifat relatif. Di samping itu ada juga nilai praktis yang kebenarannya bersifat fungsional di mana nilai sesuatu itu tergantung pada fungsinya.⁶⁰

Sesuai dengan jenisnya, Spranger⁶¹ mengklarifikasi nilai menjadi:

- a. Nilai pengetahuan.
- b. Nilai sosial,

⁶⁰ Margono dkk, *Ibid.* Op.Cit. h. 66.

⁶¹ *Ibid.*

- c. Nilai ekonomi,
- d. Nilai kekuasaan,
- e. Nilai estetis, dan
- f. Nilai agama.

Phenix dalam Margono dkk⁶² mengklarifikasikan nilai sebagai berikut:

- a. Nilai simbolis (bahasa, matematika, bahasa isyarat, ritual-ritual dan sistem simbol lainnya),
- b. Empiris (ilmu pengetahuan); estetis (seni); etis (makna-makna moral) ,
- c. Sinnoetis (pengalaman-pengalaman atau pengetahuan relasional yang bersifat pribadi), dan
- d. Sinoptis (seperti agama, filsafat, sejarah).

Nilai juga diklarifikasikan menjadi nilai universal atau nilai objektif atau nilai intrinsik dan ada juga nilai subjektif atau instrumental, nilai praktis atau fungsional.

Setelah membahas pengertian dari nilai maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan jika yang dimaksud dengan Pancasila sebagai sistem etika adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila merupakan suatu nilai yang sudah menjadi pilihan bangsa tersebut digunakan sebagai landasan atau

⁶² *Ibid.*

acuan dalam hidup dan saling berinteraksi dengan manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

6. Pancasila Sebagai Landasan Teori Hukum Indonesia

Kemerdekaan Indonesia yang dinyatakan dalam Proklamasi 17 Agustus 1945 memberi arti berlakunya tata hukum nasional dan tidak berlakunya tata hukum kolonial. Tata hukum yang baru tersebut dilandaskan pada kerohanian Pancasila, jadi tata hukum itu dapat disebut sebagai Sistem Hukum Pancasila. Salah satu usaha untuk mengorganisasikan kehidupan masyarakat antara lain dengan jalan hukum. Suatu bangsa, sadar atau tidak, selalu dihadapkan pada suatu pertanyaan fundamental terlebih dahulu, yaitu bagaimana pandangan mengenai manusia dalam masyarakat. Pancasila adalah jawaban bangsa Indonesia terhadap pertanyaan dasar tersebut yang dinyatakan secara sadar dan eksplisit. Kedudukan Pancasila niscaya merupakan wawasan kemanusiaan dan kemasyarakatan yang terdalem mengenai keharusan-keharusan yang dikehendaknya.

Teorisasi hukum secara mendasar Pancasila akan memunculkan Teori Hukum Pancasila. Teorisasi tersebut terjadi atas dasar kesadaran bahwa pengorganisasian masyarakat di dasarkan pada Pancasila, termasuk sistem hukumnya. Penyusunan sistem hukum Pancasila sudah diamanatkan sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, khususnya pada bagian pembukaan. Hukum adalah bidang yang paling jelas mendapatkan tugas untuk berbenah atas dasar Pancasila. Bahwa sampai sekarang tugas tersebut belum diselesaikan dengan baik adalah soal lain. Perkembangan tersebut merupakan bagian penting

yang dapat dijelaskan dari adanya hubungan kait-mengait yang erat antara hukum dengan bidang-bidang lain dalam masyarakat. Hukum bukan lembaga yang memiliki otonomi penuh untuk menata masyarakat. Apa yang dapat dilakukan oleh hukum banyak tergantung dan ditentukan oleh interaksinya dengan proses dan kekuatan lain dalam masyarakat.⁶³

Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum sehingga segala aspek ketatanegaraan harus berdasar pada hukum positif. Segala ide dan konsep yang tercipta entah itu sistem ekonomi Pancasila atau sistem Politik Pancasila, hanya dapat dilakukan apabila terdapat hukum. Kaitannya dengan hal tersebut hukum merupakan saringan yang harus dilalui oleh konsep dan sistem tersebut agar dapat dijalankan atau terwujud.⁶⁴ Dan disinilah pentingnya Pancasila dalam pembangunan hukum di Indonesia. Segala bentuk aturan yang akan diberlakukan (menjadi hukum positif) terlebih dahulu harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Karena lima dasar negara itulah yang akan menjadi barometer dalam membentuk suatu aturan yang bersifat hierarkis. Aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Dengan demikian, substansi hukum yang dikembangkan harus merupakan perwujudan atau penjabaran sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Artinya, substansinya produk hukum merupakan karakter produk hukum yang responsif (untuk kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan aspirasi rakyat).

7. Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Berbangsa dan Bemegara

⁶³ Sucipto Raharjo, 2009, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*. Gentang Publish. Yogyakarta. H. 124-125.

⁶⁴ Sucipto, *Ibid*, Op.Cit. h. 125.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, paradigma berarti kerangka berpikir. Robert Fredrichs pada tahun 1970 merumuskan pengertian paradigma sebagai suatu pandangan yang mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok permasalahan yang semestinya dipelajari. Kemudian pada tahun 1975, Goerge Ritzer memberikan pengertian yang lebih jelas dibandingkan dengan pengertian paradigma sebelumnya. Paradigma adalah suatu pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang atau disiplin ilmu pengetahuan. Dengan demikian paradigma merupakan alat bantu bagi ilmuwan dalam merumuskan apa yang harus dipelajari, persoalan-persoalan apa yang harus dijawab, bagaimana seharusnya menjawab, serta aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan ilmu yang diperoleh.⁶⁵

Paradigma adalah suatu jendela tempat seseorang akan menyaksikan fenomena, memahami, dan menafsirkan secara objektif berdasarkan kerangka acuan yang terkandung didalam paradigma tersebut, baik itu konsep-konsep, asumsi-asumsi, dan kategori-kategori tertentu. Oleh karena itu, terhadap suatu fenomena yang sama yang dilihat dari paradigma yang berbeda akan menghasilkan suatu kesimpulan yang berbeda.

Pancasila sebagai paradigma kehidupan berarti Pancasila merupakan dasar/kerangka berpikir/fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia memandang dunia dalam kerangka Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Misalnya dalam melaksanakan pembangunan

⁶⁵ Lebih Lanjut lihat ketentuan UU No. 10. Tahun 2004.

nasional. Bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai barometer keberhasilan pembangunan. Apakah pembangunan nasional yang dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, atau malah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Begitu juga dalam hal perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga berdasarkan Pancasila. Segala ilmu pengetahuan yang berkembang di Indonesia disesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tidak semua ilmu pengetahuan dan teknologi dapat berkembang di Indonesia.

Realitas sejarah membuktikan bahwa sejak berakhirnya perang dingin yang kental diwarnai persaingan ideologi antara blok Barat yang mengunggulkan liberalisme-kapitalisme dan blok Timur yang mempromosikan komunismesosialisme, terjadi perubahan mendasar pada tata pergaulan dunia. Beberapa kalangan mengatakan bahwa setelah berakhirnya perang dingin yang ditandai dengan bubarnya negara Uni Soviet dan runtuhnya tembok Berlin di akhir dekade 1980-an dunia ini mengakhiri periode bipolar dan memasuki periode multipolar. Periode multipolar yang dimulai awal 1990-an yang kita alami selama satu dekade, juga pada akhirnya disinyalir banyak pihak terutama para pengamat politik internasional, telah berakhir setelah Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden George Bush mengemukakan doktrin unilateralisme dalam menangani masalah internasional sebagai wujud dari konsepsi unipolar yang ada di bawah pengaruhnya.

Berakhirnya perang ideologi tidak berarti hilangnya konsep “saling mempengaruhi” antarnegara. Kemungkinan untuk saling berebut pengaruh dapat kembali muncul, sebagaimana fenomena persaingan antarbangsa dan negara pada

dimensi ekonomi warga bangsanya (AFTA 2010). Kedudukan ideologi nasional suatu negara akan berperan dalam mengembangkan kemampuan bersaing negara yang bersangkutan dengan negara lainnya. Pancasila sebagai ideologi memiliki karakter utama sebagai ideologi nasional. Ia adalah paradigma dan metode bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

Sebagai paradigma kehidupan, Pancasila menjadi pedoman dan pegangan bagi tercapainya persatuan dan kesatuan dikalangan warga bangsa dan membangun pertalian batin antar warga negara dan tanah airnya. Dengan ideologi nasional yang mantap seluruh dinamika sosial, budaya, dan politik dapat diarahkan untuk menciptakan peluang positif bagi pertumbuhan kesejahteraan bangsa. Dengan ditabuhnya gendang reformasi, ini merupakan kesempatan emas yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk merevitalisasi semangat dan cita-cita para pendiri negara kita untuk membangun negara Republik Indonesia yang berkarakter. Meskipun sekarang terlihat melemahnya kesadaran hidup berbangsa terutama dalam bidang politik. Manifestasinya muncul dalam bentuk gerakan separatisem, tidak direndahkannya konsesus nasional, pelaksanaan otonomi daerah yang menyuburkan etnosentrisme dan desentralisasi korupsi, demokratis yang dimanfaatkan untuk mengembangkan paham sektarian, dan munculnya kelompok-kelompok yang mempromosikan secara terbuka ideologi diluar Pancasila. Dengan demikian, diperlukan suatu kebulatan untuk mereaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan agar kesejahteraan

nasional dan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dapat terwujud.

3. Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila

Sebelum kita masuk pada pokok bahasan kita perlu tau lebih dulu apa makna sebenarnya dari aktualisasi tersebut. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, aktualisasi diambil dari kata actual yaitu “betul -betul ada (terlaksana)”. Jadi aktualisasi Pancasila adalah mengaplikasikan atau mewujudkan nilai nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia mengandung konsekuensi setiap aspek dalam penyelenggaraan negara dan sikap dan tingkah laku bangsa Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara harus berdasar pada nilai nilai Pancasila. Hakikat Pancasila adalah bersifat universal, tetap dan tidak berubah. Nilai nilai tersebut perlu dijabarkan dalam setiap aspek dalam penyelenggaraan negara dan dalam wujud norma norma baik norma hukum, kenegaraan, maupun norma norma moral yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia.

Permasalahan pokok dalam aktualisasi Pancasila adalah bagaimana wujud realisasinya itu, yaitu bagaimana nilai nilai pancasila yang universal itu dijabarkan dalam bentuk bentuk norma yang jelas dalam kaitannya dengan tingkah laku semua warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dalam kaitannya dengan segala aspek penyelenggaraan negara.

Berdasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia bahwa setiap manusia adalah sebagai individu dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Kesepakatan kita sebagai suatu kesepakatan yang luhur untuk mendirikan negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila mengandung konsekuensi bahwa kita harus merealisasikan Pancasila itu dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan tingkah laku dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bagi bangsa Indonesia merealisasikan Pancasila adalah merupakan suatu keharusan moral maupun yuridis.

Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macam yaitu aktualisasi Pancasila obyektif dan subyektif :

a. Aktualisasi Pancasila yang Objektif

Aktualisasi Pancasila obyektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara lain legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Selain itu juga meliputi bidang aktualisasi lainnya seperti politik, ekonomi, hukum terutama dalam penjabaran ke dalam undang undang, GBHN, pertahanan keamanan, pendidikan maupun bidang kenegaraan lainnya.

Selain itu juga meliputi bidang-bidang aktualisasi lainnya seperti politik, ekonomi, hukum terutama dalam penjabaran ke dalam undang-undang, GBHN, pertahanan keamanan, pendidikan maupun bidang kenegaraan lainnya. Adapun aktualisasi Pancasila Subyektif adalah aktualisasi Pancasila pada setiap individu terutama dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan

masyarakat. Aktualisasi yang subjektif tersebut tidak terkecuali baik warga negara biasa, aparat penyelenggara negara, penguasa negara, terutama kalangan elit politik dalam kegiatan politik perlu mawas diri agar memiliki moral Ketuhanan dan Kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam Pancasila.

b. Aktualisasi Pancasila yang Subjektif

Aktualisasi Pancasila subyektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi, perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa dan setiap orang Indonesia dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Aktualisasi Pancasila yang subjektif ini justru lebih penting dari aktualisasi yang objektif, karena aktualisasi subjektif ini merupakan persyaratan keberhasilan aktualisasi yang objektif.

Pelaksanaan Pancasila yang subjektif sangat berkaitan dengan kesadaran, ketaatan, serta kesiapan individu untuk mengamalkan Pancasila. Pelaksanaan Pancasila yang subjektif akan terselenggara dengan baik apabila suatu keseimbangan kerohanian yang mewujudkan suatu bentuk kehidupan dimana kesadaran wajib hukum telah terpadu menjadi kesadaran wajib moral, sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang tidak memenuhi wajib untuk melaksanakan Pancasila bukan hanya akan menimbulkan akibat moral, dan ini lebih ditekankan pada sikap dan tingkah laku seseorang. Sehingga Aktualisasi Pancasila yang subjektif berkaitan dengan norma-norma moral.

B. Komunikasi Politik

1. Pengertian Komunikasi Politik

Bertolak dari konsep komunikasi dan konsep politik , maka upaya untuk mendekati pengertian apa yang dimaksud komunikasi politik, menurut Dahlan ialah suatu bidang atau disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik, atau berpengaruh terhadap perilaku politik.⁶⁶

Meadow dalam Nimmo juga membuat definisi bahwa “ litical communication refres to any exchange of symbols or messages that to a significant extent heve been shaped by or have consequences for political system. " Di sini Maedow member tekanan bahwa simbol-simbol atau pesan yang disampaikan itu secara signifikan dibentuk atau memiliki konsekuensi terhadap sistem politik.⁶⁷

Menurut Fitri Yanti, komunikasi politik adalah suatu penyampaian pesan politik yang secara sengaja dilakukan oleh komunikator kepada komunikan dengan tujuan membuat komunikan berperilaku tertentu.⁶⁸

Menurut Miriam Budiardjo, komunikasi politik merupakan salah satu fungsi partai politik, yakni menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat serta mengaturnya sedemikian rupa “penggabungan

⁶⁶ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi Edisi Revisi 2011* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 29.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Fitri Yanti, *Komunikasi Politik dan Politik Komunikasi Suatu Relasi dan Peran Media Masa*, Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Vol. 5/ No. 3 (Januari-Juni 2007), h. 52.

kepentingan”(interest agregation) dan “perumusan kepentingan” (*interest aniculation*) untuk diperjuangkan menjadi kebijakan publik.⁶⁹

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan, maka menurut penulis komunikasi politik adalah suatu proses komunikasi yang memiliki implikasi atau konsekuensi terhadap aktivitas politik, serta penyalur aspirasi rakyat untuk dijadikan kebijakan publik.

2. Unsur-unsur Komunikasi Politik

Seperti halnya dengan disiplin komunikasi lainnya, maka komunikasi politik sebagai baafy of knowledge juga terdiri atas berbagai unsure, yakni sumber (komunikator), pesan, media atau saluran, penerima dan efek.

a. Komunikator Politik

Menurut Roni Tabroni, komunikator politik adalah orang yang melakukamn komunikasi dalam konteks politik kapanpun dan dimanapun pesan itu disampaikan. Ia menyampaikan pesan-pesan politik, baik kepada individu, kelompok maupun masa. Komunikator merupakan orang yang terlibat dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁷⁰

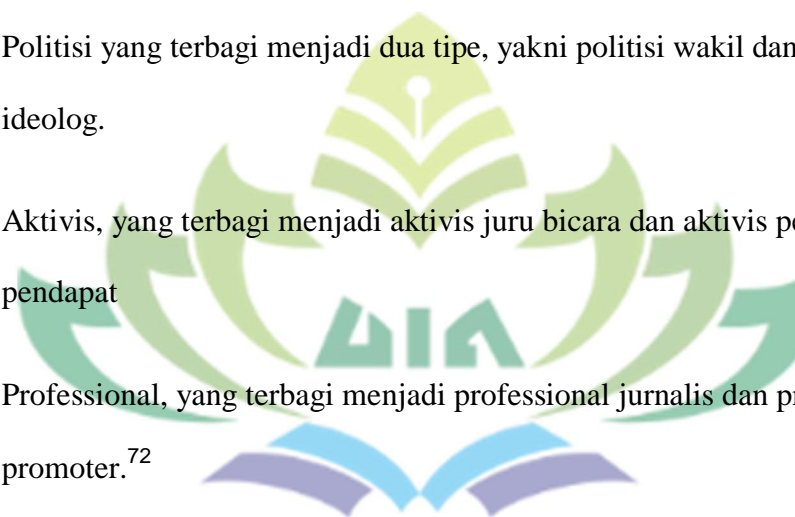
Menurut Asep Saeful Muhtadi, komunikator dalam komunikasi politik adalah pihak yang memprakarsai dan mengarahkan suatu tindak komunikasi. Seperti dalam pristiwa komunikasi pada umumnya, komunikator dalam

⁶⁹ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 405-406,

⁷⁰ Hafied Cangara, *Op.Cit.* h. 31.

komunikasi politik dapat dibedakan dalam wujud individu, lembaga, ataupun berupa kumpulan orang.⁷¹

Menurut Gun Gun Heryanto dan Shulhan Rumar, komunikator politik merupakan orang atau lembaga yang berkepentingan menyampaikan pesan politik kepada pihak lain, baik bersifat formal maupun informal dengan tujuan menciptakan pemahaman bersama (*mutual understanding*) dengan khalayak yang menjadi sasaran penyampaian pesannya. Komunikator dalam komunikasi politik terdiri atas berikut ini :

- Politisi yang terbagi menjadi dua tipe, yakni politisi wakil dan politisi ideolog.
 - Aktivistis, yang terbagi menjadi aktivis juru bicara dan aktivis pemuka pendapat
 - Professional, yang terbagi menjadi profesional jurnalis dan profesional promotor.⁷²
- 

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan, maka menurut penulis komunikator politik adalah orang atau lembaga, individu maupun kelompok yang dapat member informasi tentang politik atau segala sesuatu yang mengandung unsur politik.

b. Pesan Politik

⁷¹ Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi Politik Indonesia, Dinamika Politik Pasca Orde Baru* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 15.

⁷² Gun Gun Heryanti dan Shulhan Rumar, *Komunikasi Politik Sebuah Pengantar* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), h. 15.

Pesan politik ialah pernyataan yang disampaikan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun nonverbal, tersembunyi maupun terang-terangan, baik disadari maupun tidak disadari yang isinya mengandung bobot politik.⁷³

c. Saluran atau Media Politik

Pada dasarnya, komunikasi politik memerlukan saluran. Saluran komunikasi politik berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada masyarakat banyak. Menurut Hafied Cangara, saluran atau sasaran media politik adalah alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Misalnya Media Cetak. surat kabar, tabloid, majalah, buku. Media Elektronik : film, radio, televisi, video, computer, internet.⁷⁴ Menurut Asep Saeful Muhtadi, saluran atau media politik adalah setiap pihak atau unsur yang memungkinkan sampainya pesan-pesan politik.⁷⁵

Beragamnya pesan yang disampaikan oleh politikus dalam konteks komunikasi politik, menyebabkan perlunya saluran komunikasi politik dengan berbagai bentuk. Pesan komunikasi politik kadang disampaikan lewat lembaga-lembaga tertentu, seperti kata, gambar, atau perilaku tertentu yang ada kaitannya dengan aktivitas politik. Ada pesan yang cukup dengan isyarat, tapi banyak yang harus disampaikan lewat sebuah pementasan tertentu atau karya seni yang lebih

⁷³ Hafied Cangara, *Op.Cit.* h. 31.

⁷⁴ *Ibid*, h. 32.

⁷⁵ Asep Saeful Muhtadi, *Op.Cit*, H. 34.

rumit. Yang lebih penting dari saluran komunikasi politik ini adalah bagaimana agar pesan-pesan politik dapat sampai kepada yang dituju dan dapat dimengerti sehingga terbangun kesadaran atau kesamaan persepsi tentang pesan politik yang dimaksud.⁷⁶

Siapapun yang menjadi komunikator politik perlu memiliki keahlian atau kemampuan menyampaikan pesannya secara tepat. Setiap lapisan masyarakat tentu saja memiliki karakter masing-masing. Terlebih kalau bicara budaya yang sangat beragam, penyampaian pesan politik tidak lagi hanya persoalan teknis, tetapi juga bagaimana masyarakat yang sangat beragam itu dapat memahami substansi dari pesan politik yang disampaikan oleh komunikator.⁷⁷ Sekurangnya ada tiga saluran komunikasi politik diantaranya adalah :

a. Komunikasi Massa

Komunikasi Massa adalah komunikasi melalui media massa, yakni surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film. Komunikasi massa menurut Ellizabteh-NoelleNeuman, sebagaimana dikutip oleh Jalalludin Rakhmat adalah :

- Bersifat tidak langsung, artinya harus melewati media teknis,
- Bersifat satu arah, artinya tidak ada interaksi antara komunikan

⁷⁶ Roni Tabroni, *Op.Cit.* h. 40.

⁷⁷ *Ibid*, h. 41.

- Bersifat terbuka, artinya ditujukan kepada publik yang tidak terbatas
Memiliki publik yang secara geografis tersebar.⁷⁸

Sedangkan definisi komunikasi sendiri sampai saat ini masih terdapat banyak perdebatan di kalangan para ahli komunikasi, karena terdapat banyak sekali perbedaan mereka dalam memberikan definisi komunikasi itu sendiri. Mulai dari yang sempit, misalnya “komunikasi adalah penyampaian pesan melalui media elektronik” atau bahkan yang terlalu luas, misalnya “komunikasi adalah interaksi antara dua makhluk hidup atau lebih” sehingga para peserta komunikasi ini mungkin termasuk hewan ataupun tanaman.

Selanjutnya apa itu komunikasi massa? Telah banyak sekali definisi tentang komunikasi massa yang dikemukakan oleh para ahli komunikasi. Namun, pada dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa (media cetak dan elektronik).⁸⁵ Media massa yang dimaksud disini adalah media massa yang bersifat modern ataupun yang dihasilkan oleh teknologi, bukan media tradisional yang sering dikenal seperti kentongan, bedug dan lain-lain.

Beberapa definisi komunikasi massa menurut para ahli :

- a. Joseph R. Dominick : Komunikasi massa adalah suatu proses dimana suatu organisasi yang kompleks dengan bantuan satu atau lebih mesin

⁷⁸ Jallaludin Rakhmad, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT, Remaja Rosdakarya, 1998), h. 20.

memproduksi dan mengirimkan pesan kepada khalayak yang besar, heterogen, dan tersebar.

- b. Jalaluddin Rakhmat : Komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen dan anonim melalui media cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat.
- c. DeFleur dan Denis : Komunikasi massa adalah suatu proses dalam mana komunikator-komunikator menggunakan media untuk menyebarkan pesan-pesan secara luas, dan secara terus menerus menciptakan makna-makna yang diharapkan dapat mempengaruhi khalayak yang besar dan berbeda-beda dengan melalui berbagai cara.
- d. Ellizabteh-Noelle-Neuman sebagaimana dikutip oleh Jallaludin Rakhmat! : komunikasi masa adalah :
- Bersifat tidak langsung, artinya harus melewati media teknis.
 - Bersifat satu arah, artinya tidak ada interaksi antara komunikan dan komunikator.
 - Bersifat terbuka, artinya ditujukan kepada public yang tidak terbatas
 - Mempunyai publik yang secara geografis terbesar.⁷⁹

⁷⁹ Jallaludin Rakhmad, *Op.Cit*

Kemudian apa itu media massa? Dan apa hubungannya dengan komunikasi massa? Kedua istilah diatas sangatlah berkaitan erat, media massa menjadi bagian yang ada dalam komunikasi massa. Yang dikatakan media massa disini antara lain, media elektronik (televisi, radio & internet), media cetak (surat kabar, majalah & tabloid). Dari ragam bentuk media massa ini, internet merupakan media massa yang dapat dikatakan sebagai media yang masih baru dan juga masih menjadi perdebatan akan perannya pada media massa.

2) Komunikasi Interpersonal

Dalam kajian komunikasi, komunikasi interpersonal (tatap muka) tergolong komunikasi yang tradisional. Namun sampai saat ini, sesungguhnya tidak ada yang dapat menggantikan fungsi komunikasi manusia yang selalu dinamis dan memiliki kelebihan pada aspek pendekatan humanitasnya. Ditengah perkembangan teknologi yang sangat canggih sekalipun, sentuhan komunikasi secara langsung memiliki tingkat efektivitas tersendiri.

Jika dilakukan dalam konteks politik, komunikasi interpersonal dapat digunakan sebagai ajang untuk melakukan lobi politik. Kendati setiap politikus dapat melakukannya dengan teknologi canggih seperti handphone, email, atau facebook ; manusia belum menemukan kepuasan jika tidak melakukannya secara langsung. Berbagai komitmen politik dilakukan biasanya lewat pola komunikasi interpersonal. Walaupun komunikasi interpersonal memiliki kekurangan dari

aspek keterjangkauan, paling tidak pola ini dapat digunakan untuk hal-hal yang spesifik, langsung, dan khusus baik orangnya maupun pesannya.⁸⁰

3. Komunikasi Organisasi

Secara etimologi (bahasa), kata “komunikasi” berasal dari bahasa Inggris “Communication” yang mempunyai akar kata dari bahasa latin “Comunicare”. Kata “Comunicare” sendiri memiliki tiga arti yaitu: “to make common” atau membuat sesuatu jadi umum, kemudian “cum dan munus” berarti saling memberi sesuatu sebagai hadiah, dan yang terakhir yaitu membangun penahanan bersama.⁸¹

Sedangkan secara epistemologi (istilah) menurut Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi dalam bukunya yang berjudul “Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi” mendefinisikan komunikasi adalah sebagai berikut: “Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan tersebut dapat difahami.”⁸²

Onong Uchjana mengatakan komunikasi sebagai proses komunikasi pada Melanin ndnlah pluses penyampaian pikiran, atau perasaan oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan). Pikiran bisa merupakan gagasan

⁸⁰ Roni Tabroni, *Op.Cit.* h. 42.

⁸¹ Muhammad Mufid, *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran* (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2005), Cet. 3, h. 2.

⁸² Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), Cet. 9, h. 169.

informasi, opini, dan lain-lain yang muncul dari benaknya. Perasaan bisa berupa keyakinan, kegairahan, dan sebagainya yang timbul dari lubuk hati.⁸³

Dari definisi tersebut terkandung dua pengertian, yaitu Proses dan Informasi. Proses merupakan suatu rangkaian daripada langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus dilalui dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi atau keterangan ialah segenap rangkaian perkataan, kalimat, gambar, kode atau tanda tertulis lainnya yang mengandung pengertian, buah pikiran atau pengetahuan apapun yang dapat dipergunakan oleh setiap orang yang mempergunakannya untuk melakukan tindakan-tindakan yang benar, baik dan tepat.⁸⁴

Dari beberapa definisi tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan informasi dari seseorang komunikator kepada komunikan sehingga tercapailah tujuan saling pengertian satu sama lainnya.

Istilah organisasi berasal dari bahasa Latin *Organizare*, yang secara bahasa berarti panduan dari bagian-bagian yang satu sama lainnya saling bergantung. Diantara para ahli ada yang menyebut panduan itu sistem, ada juga yang menamakannya sarana.⁸⁵

⁸³ M. Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi, Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 1

⁸⁴ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), h. 156

⁸⁵ Khomsahrial Romli, *Komunikasi Organisasi Lengkap* (Jakarta: Grasindo, 2011), h. 1.

Schein (1982) mengatakan bahwa organisasi adalah suatu kordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi melalui hierarki otoritas dan tanggung jawab. Schcin juga mengatakan bahwa organisasi mempunyai karakteristik tertentu yaitu mempunyai struktur, tujuan, saling berhubungan satu bagian dengan bagian yang lain dan tergantung kepada komunikasi manusia untuk mengkordinasikan aktivitas dalam organisasi tersebut.⁸⁶

Robbins (1993) mengatakan Organisasi adalah bentuk keija sama yang sistemik antara sejumlah orang untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Kerja sama karena didalamnya terbentuk jalinan, hubungan, relasi, dan komunikasi antar sejumlah orang yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama atau yang berbeda-beda (subsistem) lalu membentuk sebuah sistem (berinterelasi satu sama lain) untuk memenuhi tujuan yang ideal dan konkrit yang telah disepakati bersama.⁸⁷

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Komunikasi Organisasi adalah suatu proses menciptakan kemudian menyampaikan informasi, ide-ide, gagasan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain guna tercapainya tujuan yang sama.

⁸⁶ Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), Cet. 7h. 23.

⁸⁷ Alo Liliweri, *Sosiologi dan Komunikasi Organisasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), h. 51.

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan, maka menurut penulis saluran atau media politik adalah segala bentuk perangkat yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan politik kepada komunikan yang sekurang-kurangnya menggunakan tiga saluran komunikasi politik: pertama, media komunikasi massa, kedua, komunikasi interpersonal, ketiga, komunikasi organisasi.

e. Sasaran atau target politik

Sasaran adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat member dukungan dalam bentuk pemberian suara (vote) kepada partai atau kandidat dalam pemilihan umum.⁸⁸

f. Efek komunikasi politik

Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik, dimana nuansanya akan bermuara pada pemberian suara (vote) dalam pemilihan umum.⁸⁹

3. Fungsi Komunikasi Politik

Sebagai disiplin ilmu, maka komunikasi politik menurut McNair memiliki lima fungsi dasar, yakni :

⁸⁸ Hafied Cangara, *Op. Cit.* h. 3.

⁸⁹ *Ibid.* h. 32-33.

- a. Memberikan informed kepada masyarakat apa yang terjadi diakuinya.
Untuk itu media komunikasi diharapkan memiliki fungsi pengamatan, dan juga fungsi monitoring apa yang teljadi dalam masyarakat.
- b. Mendidik masyarakat terhadap arti dan signifikansi fakta yang ada. Para jurnalis diharapkan melihat fakta yang ada, sehingga berusaha membuat liputan yang objektif (objective reporting) yang bisa mendidik masyarakat atas realitas fakta tersebut.
- c. Menyediakan diri sebagai platform untuk menampung masalahmasalah politik sehingga bisa menjadi wacana dalam membentuk opini publik, dan mengembalikan hasil opini itu kepada masyarakat. Dengan cara demikian bisa memberi arti dan nilai pada usaha penegakan demokrasi.
- d. Membuat publikasi yang ditujukan kepada pemerintah dan lembagalembaga politik.
- e. Dalam masyarakat yang demokratis, maka media politik berfungsi sebagai saluran advokasi yang bisa membantu agar kebijakan dan program-program lembaga politik dapat disalurkan kepada media masa.⁹⁰

4. Tujuan Komunikasi Politik

Ardial dalam Roni Tabroni memandang bahwa tujuan komunikasi politik nga berkaitan dengan pesan politik yang disampaikan komunikator. Sesuai angan tujuan komunikasi, tujuan komunikasi politik itu adakalanya sekedar

⁹⁰ *Ibid*, h. 33.

menyampaikan informasi politik, membentuk citra politik, membentuk opini publik, dan juga bisa menghendak pendapat atau tuduhan lawan politik. Lebih jauh dari itu, komunikasi politik juga bertujuan menarik simpati publik untuk meningkatkan partisipasi politik sesuai dengan kepentingannya.

a. Citra Politik

Citra berasal dari bahasa Jawa yang berarti gambar. Kemudian citra dikembangkan menjadi gambaran sebagai padanan kata *image* dalam bahasa Inggris. Kenneth E. Boulding dalam Ardial menjelaskan bahwa citra dibentuk sebagai hasil dari pengetahuan masalah pemilik citra, dan sejarah merupakan bagian dari citra itu sendiri.⁹¹ Berdasarkan penjelasan Boulding tersebut, dapat disimpulkan bahwa citra merupakan serangkaian pengetahuan, pengalaman dan perasaan maupun penilaian yang diorganisasikan ke dalam sistem kognisi manusia; atau pengetahuan pribadi yang sangat diyakini kebenarannya.

Jadi, citra politik bisa dipahami sebagai gambaran seseorang yang terkait dengan politik (kekuasaan, kewenangan, otoritas, konflik dan konsensus). Citra politik berkaitan dengan pembentukan pendapat umum karena pada dasarnya pendapat umum politik terwujud sebagai konsekuensi dari kognisi komunikasi politik. Roberts masih dalam Ardial, menyatakan bahwa komunikasi tidak secara langsung menimbulkan pendapat atau perilaku tertentu, tetapi cenderung memengaruhi cara khalayak mengorganisasikan

⁹¹ Ardial dalam Roni Tabroni, *Komunikasi Politik Pada Era Multimedia* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2012), h. 26.

citranya tentang lingkungan dan citra itulah yang memengaruhi pendapat atau perilaku khalayak.⁹²

Oleh karena itu, citra politik dapat dirumuskan sebagai gambaran tentang politik yang memiliki makna kendati tidak selamanya sesuai dengan realitas politik yang sebenarnya. Citra politik tersusun melalui kepercayaan, nilai, pengharapan dalam bentuk pendapat pribadi yang selanjutnya dapat berkembang menjadi pendapat umum. Citra politik itu terbentuk berdasarkan informasi yang kita terima, baik langsung maupun melalui media politik, termasuk media massa, yang bekerja untuk menyampaikan pesan politik yang umum dan aktual.⁹³

b. Opini Publik

Komunikasi politik sangatlah berkaitan erat dengan opini publik. Hal ini dianggap sebagai konsekuensi sebuah proses pencitraan yang dilakukan terlebih dalam konteks dimana pencitraan itu menggunakan media massa sebagai salah satu instrumen pendukungnya. Opini publik akan terbentuk ketika komunikator politik menyampaikan gagasan atau pesannya kepada publik. Wacana yang dibangun sedikit banyak akan menjadi bagian dari perbincangan publik sehingga terbentuk opini publik yang sangat beragam.⁹⁴

⁹² Kenneth E. Boulding dalam Ardial dan Roni Tobroni, *Komunikasi Politik Pada Era Multimedia* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2012), h. 26-27.

⁹³ Robert dalam Ardial dalam Roni Tabroni, *Komunikasi Politik Pada Era Multimedia* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2012), h. 27

⁹⁴ *Ibid*, h. 28.

Menurut Ardial, konsep opini public bertitik tolak dari asasi yang ada pada diri manusia, yaitu hak kebebasan mengeluarkan pendapat, menyatukan kehendak idea tau gagasan.⁹⁵

c. Partisipasi Politik

Dalam sistem demokrasi, partisipasi merupakan aspek yang sangat vital. Masyarakat atau publik adalah pemberi saham terhadap republik ini. Publiklah yang akan menentukan nasib bangsa, termasuk nasib dirinya sendiri. Oleh karena itu, setiap pejabat atau wakil rakyat seringkali menyebut rakyat atau mengklaim rakyat ketika berbicara atau membuat kebijakan.⁹⁶ Dengan demikian partisipasi politik menurut Miriam Budiardjo adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).⁹⁷ Menurut seorang tokoh masalah partisipasi Herbert McClosky, partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses menentukan kebijakan umum (*the term political participation will refer to those voluntary*

⁹⁵ Ardial dalam Roni Tobroni, *Op. Cit.* h. 28.

⁹⁶ Roni Tabroni, *Op. Cit.* h. 28.

⁹⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 367.

*activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy).*⁹⁸

Menurut penulis partisipasi politik adalah keikutsertaan masyarakat sebagai warga Negara dalam menentukan segala kebijakan umum atau dalam pemilihan umum yang akan mempengaruhi hidupnya.



⁹⁸ Herbert McClosky dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 367.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardial dan Roni Tabroni, *Komunikasi Politik Pada Era Multimedia*. Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2012.
- Asep, Saeful Muhtadi. *Komunikasi Polilik Indonesia: Dinamika Islam Politik Pasca-Orde Baru*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Bungin, M. Burhan. *Sosiologi Komunikasi, Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Carlton Clymer rodee dkk, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Rajaanmdo Persada, 2008.
- Cangara, Hafied. *Komunikasi Politik :Konsep, Teori, dan Strategi, Edisi Revisi 2011* Jakarta : Rajawali Pers, 2011.
- Depertemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Jakarta, 2003.
- Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya 1984.
- Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Gun Gun Heryanto dan Shulhan Rumar, *Komunikasi Politik Suatu Pengantar*.

Bogor: Ghalia Indonesia, 2013 .

Greg Genep Sukendro dan Toto M. Mukmin (Ilustratort). *Pancasila Riwayatmu Kini*, (Jakarta: Yayasan TIFA dan Grafisosial, 2012): Yunnan TIFA dan Gnmoainl. 20120).

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research Social*, Bandung; Mandar Maju, 1996.

Kenneth E. Boulding dalam Ardial dalam Roni Tabroni, *Komunikasi Politik Pada Era Multimedia*, Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2012.

Liliweri, Alo. *Sosiologi Dan Komunikasi Organisasi*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2014.

Romli, Khomsahrial. *Komunikasi Organisasi Lengkap*, Jakarta : Grasindo, 2011.

Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Galia Indonesia, 2002.

Margono dkk. 2002. *Pendidikan Pancasila*. UM Press. Malang, 2022.

Mulyadi, Dedy. *Komunikasi politik Politik komunikasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Mufid, Muhamad. *Komunikasi Dan Regulasi Penyiaran*, Cet.3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Muhammad, Ami. *Komunikasi Organisasi, Cet.7*. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005.

Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periodc 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bemegara*, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, cet kc 2, 2012).

Rizieq Syihab, Habib. *Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariat*, (Jakarta: Suara Islam Press, 2013).

Rakhmat, Jallaludin. *Psikologi Komunikasi*, PT. Remaja msdakarya : Bandung, 2005.

Roberts dalam Ardial dalam Roni Tabroni. *Komunikasi Politik Pada Era Multimedia*, Bandung. Simbiosis Rekatama Media, 2012.

Tabroni, Rani. *Komunikasi Politik Pada Era Multimedia*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2012.

Ubaedillah, A. dan Abdul Rozak. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, edisi revisi*, (Jakarta: Pranada Media Grup dan ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Cet. VIII. 2012).

Paramita. Stefanie. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia Untuk SD, SLTP, SMU, dan Umum* (Jakarta: Aprindo, 2005).

Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*, (Cet. 24) Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Syolahuddin, Skripsi “*Urgensi Pendidikan Anak Perempuan Dalam Perspektif Islam*”, Bandar Lampung: 2012.

Tobroni dkk, 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM, Civil Society, dan Multikulturalisme*, Pusapom, Malang, 2002.

Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Cet .9. Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Yanti, Fitri. “*Komunikasi Politik dan Politik Komunikasi Suatu Relasi Dan Peran Media Masa*”. Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Vol. 5/No.3 (Januari-Juni2007).

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

